



LAPORAN KINERJA

Abstrak

"Laporan ini mencakup capaian kinerja dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020"

2021

EDISI

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANA JAKARTA



Diterbitkan oleh :
Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440
Telepon : (021) 6614712
Laman : djpsdkp.kkp.go.id
Email : psdkp.jakarta@kkp.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta kepada Unit Kerja Eselon I Ditjen PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga sebagai media informasi pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun anggaran 2021 kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: (1) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; (2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; (3) Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat; (4) Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP; (5) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; (6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; (7) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Sasaran strategi tersebut menetapkan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi acuan kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengawasan selama tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu :

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2021 sesuai DIPA Nomor : 032.05.2.440816/2021 tanggal 23 November 2020, mendapat alokasi dana sebesar Rp 41.996.958.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mengalami beberapa kali revisi sampai pada revisi terakhir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.472.676.536 ,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tioga Puluh Enam Rupiah)

Capaian kinerja pada tahun 2021 sudah memenuhi target. 21 IKU yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta telah mencapai target sesuai rencana aksi. Berdasarkan nilai NPSS Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2020 memperoleh nilai 109,98% "**Baik**". Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 34.472.676.536,- "**99,57%**".

KATA PENGANTAR

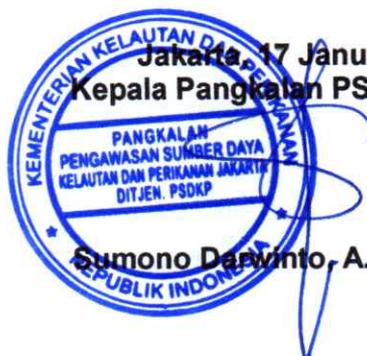
Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 17 Januari 2021
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta	3
1.4. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta	3
1.5. Wilayah Kerja	5
1.6. Armada Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas	7
1.7. Kepegawaian	8
1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2021	11
2.2. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta	12
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2021	14
2.4. Perjanjian Kinerja	15
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta	18
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021	18
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja	20
3.3.1 Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	21
3.3.2 Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	28
3.3.3 Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	33
3.3.4 Sasaran Strategis 4. Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	36
3.3.5 Sasaran Strategis 5. Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan <i>Speedboat/Rigid Inflatable/Rubber Boat</i>	38
3.3.6 Sasaran Strategis 6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	45



3.3.7 Sasaran Strategis 7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	47
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	67
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Rekomendasi	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	6
Tabel 2.	Data Armada Kapal Pengawas.....	7
Tabel 3.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB	7
Tabel 4.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe <i>Speedboat</i>	8
Tabel 5.	Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	8
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021	15
Tabel 7.	Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi.....	19
Tabel 8.	IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya	21
Tabel 9.	IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	25
Tabel 10.	Perhitungam penilaian kapal perikanan yang taat	26
Tabel 11.	Penerbitan HPK dan SLO periode triwulan tahun 2021	26
Tabel 12.	Capaian Persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS	30
Tabel 13.	Capaian Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	31
Tabel 14.	Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Kapal Pengawasan	31
Tabel 15.	Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas	32
Tabel 16.	Capaian Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	33
Tabel 17.	Hasil operasi dan cakupan teoritis <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	33
Tabel 18.	Perhitungan persentase Cakupan WPPNRI <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	34
Tabel 19.	Capaian persentase penyelesaian pembangunan kapal kelas F	35
Tabel 20.	Capaian persentase penyelesaian pembangunan prasarana	36
Tabel 21.	Capaian persentase penyelesaian perawatan sarana.....	36
Tabel 22.	Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	37
Tabel 23.	Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk.....	38
Tabel 24.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna SLO.....	38
Tabel 25.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna LVHPI	39
Tabel 26.	Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta periode tahun 2021	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta	5
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....	6
Gambar 3. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP- Jakarta	9
Gambar 4. Bagan sistem penyajian laporan kinerja	10
Gambar 5. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	44
Gambar 6. Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta.....	45



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan



fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

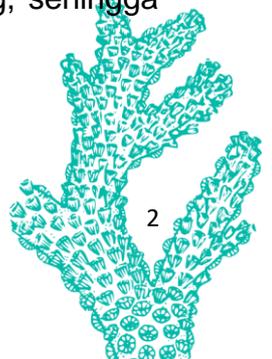
Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

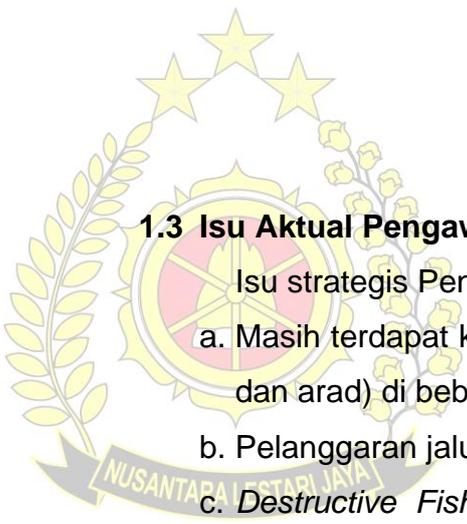
Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Desember 2021 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.





1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

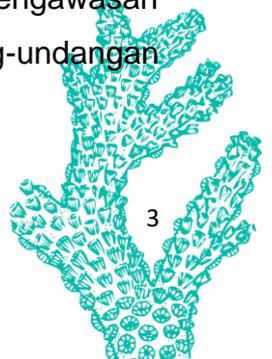
Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

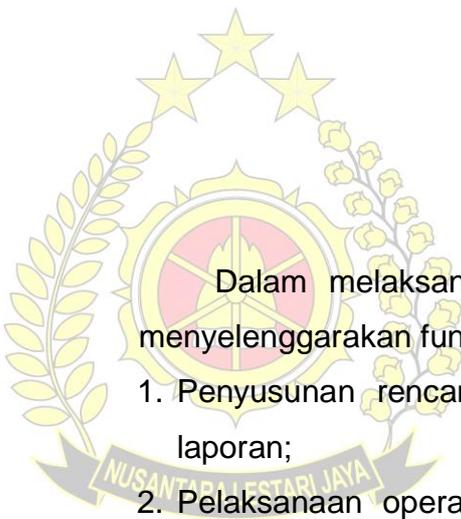
- a. Masih terdapat kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap terlarang (trawl dan arad) di beberapa daerah;
- b. Pelanggaran jalur dan daerah penangkapan ikan
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Pengawasan terhadap ikan *Invasif* diantaranya ikan arapaima, alligator yang beredar di pusat perdagangan ikan hias;
- d. Penggunaan bahan tambahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan baik skala kecil maupun skala besar
- e. Penggunaan pakan dan obat ikan yang belum teregister pada usaha budidaya ikan;
- f. Masih ditemukannya penangkapan ikan yang dilindungi (*Cites*) oleh Nelayan
- g. Pencemaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha bidang perikanan maupun non perikanan
- h. Pengawasan kesesuaian peruntukan distribusi importasi selain kebutuhan bahan baku industri/bahan penolong industri masih sulit dilakukan;
- i. Kegiatan peredaran lobster,
- j. kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020.

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2021 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

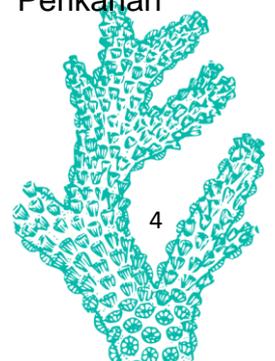
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.





Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

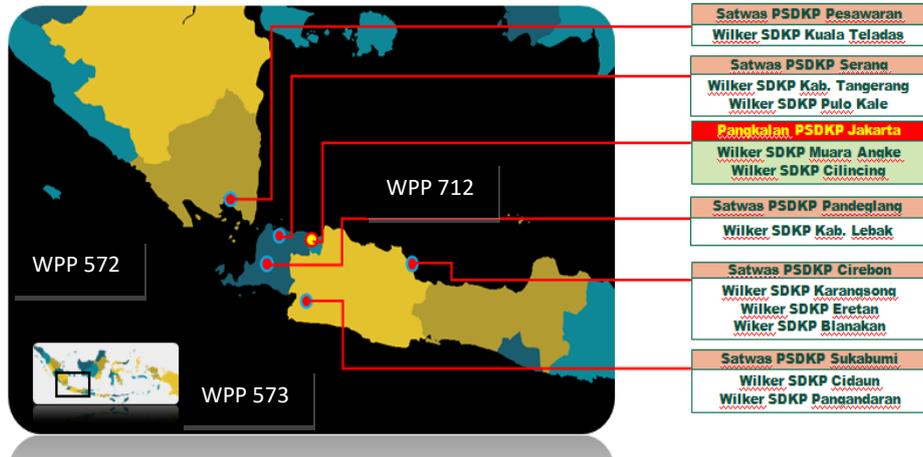
Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa.





SATWAS & WILKER LINGKUP PANGKALAN PSDKP JAKARTA

DKI Jakarta **Jawa Barat** **Banten** **Lampung**



Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon



No	Lokasi	Wilayah Kerja
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

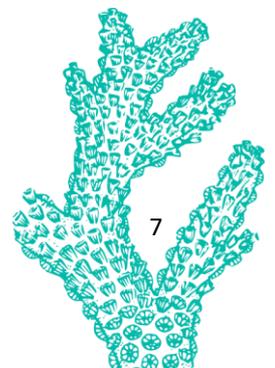
Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 5 (lima) unit *speedboat* pengawas dan 3 unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas dan *Speedboat* serta RIB & *Rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

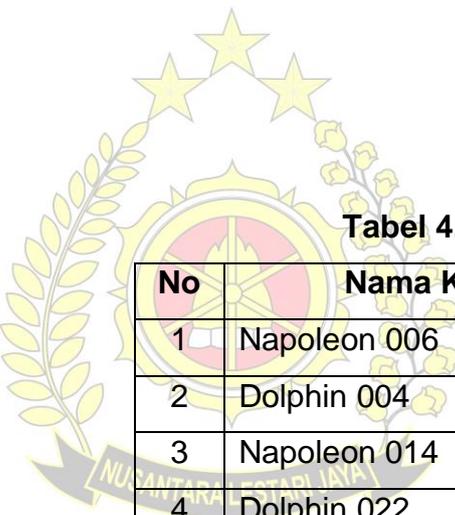
Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & *Rubber Boat*

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>RIB 2</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	6 meter
3	<i>Rubber Boat</i>	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter





Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas Tipe Speedboat

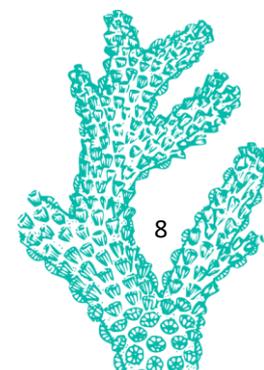
No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter

1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2021 berjumlah 136 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 82 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 54 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel di bawah ini :

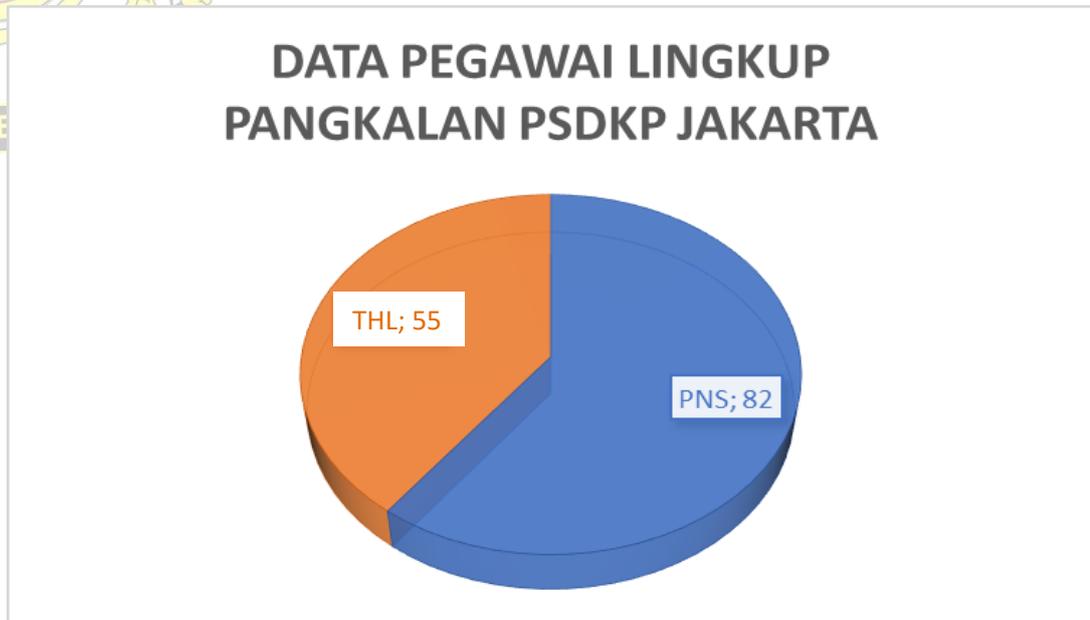
Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	THL	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	38	33	71
2	ABK Kapal Pengawas	18	-	18
3	Satwas SDKP Pesawaran	4	3	7
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	5
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	5	7	12
7	Satwas SDKP Cirebon	10	7	17
Jumlah		82	55	137





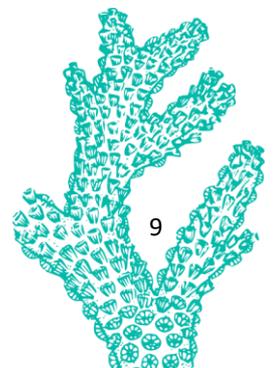
Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

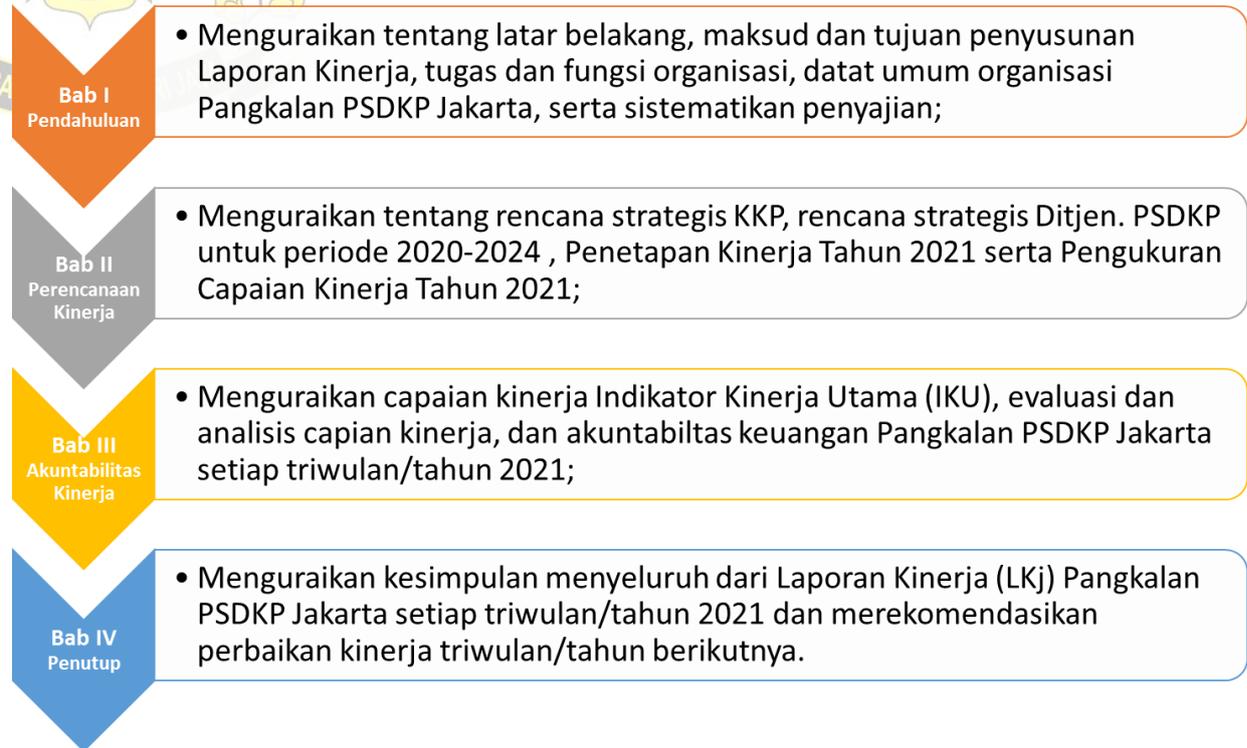
Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

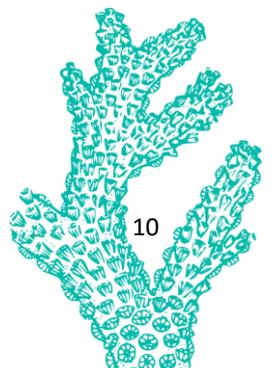


1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2021 diuraikan pada grafik berikut :



Gambar 4. Bagan sistem penyajian laporan kinerja





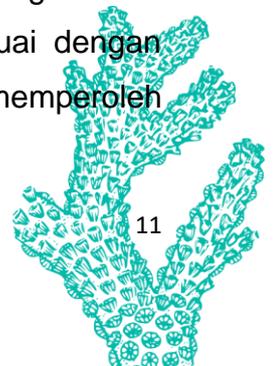
BAB III

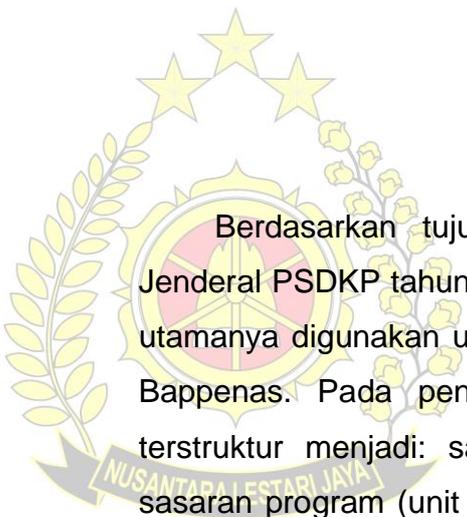
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2021.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.





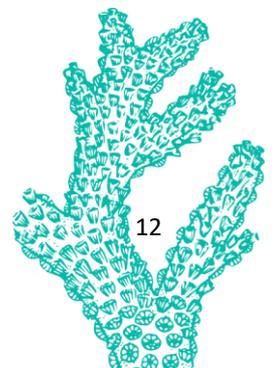
Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

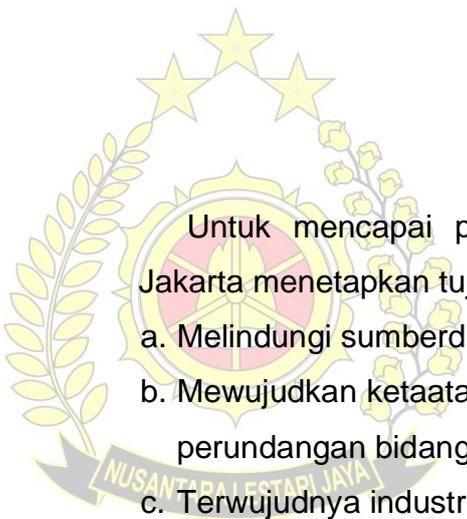
- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan system informasi dan komunikasi pengawasan SDKP
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif d wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien



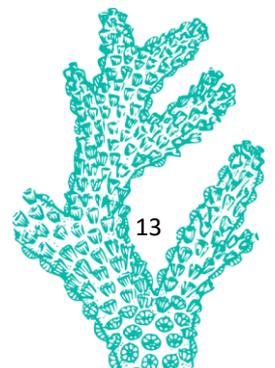


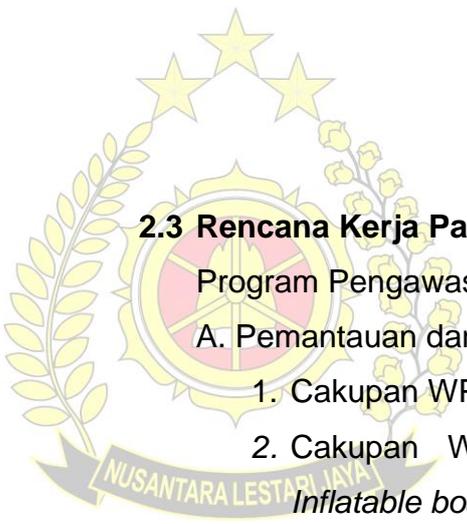
Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.





2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2021

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
2. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan *Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat*
3. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
4. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
5. *Speed Boat* Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

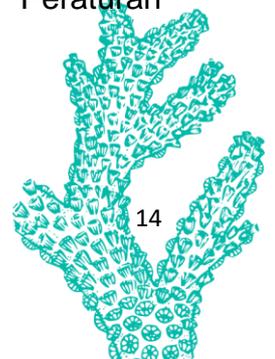
1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan





E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

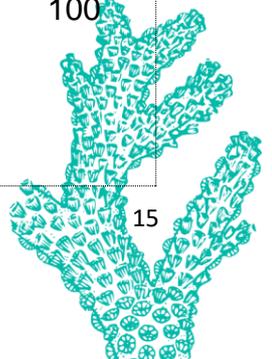
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021, yang kemudian mengalami revisi pada bulan Agustus 2021, berikut perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah direvisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

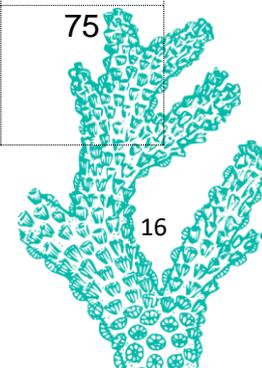
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100





NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71
4.	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	1,60
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,30
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	60,16
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		13. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75



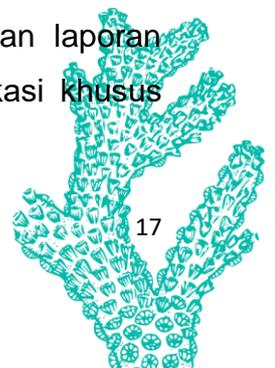


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP (lanjutan)	14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	90
		16. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)	1
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	84
		20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89
		21. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.





RAKERNIS PSDKP

"PENGUATAN SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI RAKERNIS"



BAB III

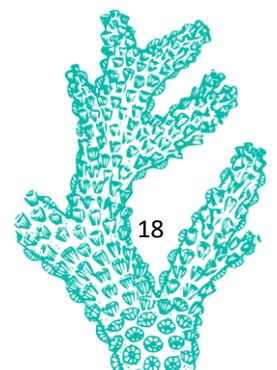
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2021 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2021

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja	Renstra 2021	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
SS1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan				
IKU 1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	95	100	105
SS2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan				
IKU 2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	120
SS3 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat				
IKU 3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71	71	100	120
SS4 Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP				
IKU 4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,42	1,60	2,08	120
IKU 5 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,106	0,30	0,34	113
SS5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP				
IKU 6 Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	60,16	97,86	120
IKU 7 Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	2	100	100	100
IKU 8 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	100	100	100
SS6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan				
IKU 9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	93	100	108

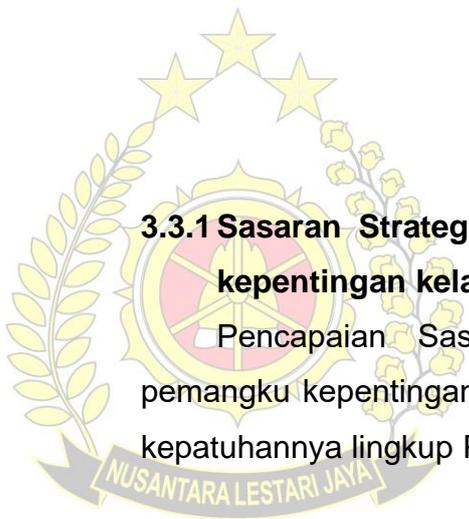


IKU 10	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	100	108
SS7 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IKU 11	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	80	90,24	113
IKU 12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	-	80	91,55	114
IKU 13	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	-	75	79,91	107
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	72	73	79,69	114
IKU 15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	-	90	98,22	109
IKU 16	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)	-	1	1	100
IKU 17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	72,5	97,5	120
IKU 18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	72,5	85,19	118
IKU 19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	82	84	99,03	118
IKU 20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	-	89	95,87	108
IKU 21	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	88	86	86,55	101

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:





3.3.1 Sasaran Strategis 1, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” yaitu Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha].

IKU 1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 120%. Hasil pengukuran 5 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8. IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya

NO	SUB IKU	2020			2021			2024 [PELAKU USAHA]
		TARGET [PELAKU USAHA]	REALISASI [PELAKU USAHA]	(%)	TARGET [%]	REALISASI [%]	(%)	
1.	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendik Cites (%)	3	17	120	95	100	120	3
2.	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan produk dan jasa kelautan (%)	12	55	120	95	100	120	18
3.	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Ruang Laut (%)	23	57	120	95	100	120	13
4.	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (%)	-	-	-	95	100	120	29



5.	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i> (%)	10	26	120	95	100	120	31
	RATA-RATA	48	155	120	95	100	120	94

Dari data diatas, capaian IKU pada tahun 2021 sudah mencapai 120% dengan target sebesar 75% sehingga realisasi lebih dari target yang ditentukan. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 136 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah tahap pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan meliputi kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi, produk dan jasa kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dan ruang laut, pencemaran perairan dan *destructive fishing*, masing-masing kegiatan telah melebihi dari target dikarenakan adanya kontrol kinerja yang baik sehingga target yang belum dicapai dapat terlaksanakan. Pada tahun 2020 IKU ini telah mencapai 120% dengan nilai pengukuran pada Sub-IKU adalah jumlah pelaku usaha yang diperiksa yaitu sebanyak 155 pelaku usaha sedangkan pada tahun ini jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebesar 136 pelaku usaha. Berdasarkan jumlah pelaku usaha IKU ini mengalami penurunan sebanyak 19 pelaku usaha selama periode tahun 2021 dikarenakan lokasi pengawasan merupakan lokasi baru serta adanya pandemi covid-19 yang kembali memuncak menjadikan pengawasan menjadi terbatas. Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memenuhi target yang telah ditentukan dengan capaian sebesar 120%. Secara kuantitas IKU ini menurun akan tetapi secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 94 pelaku usaha jika dibandingkan dengan realisasi tahun ini kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2020-2021 sehingga kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat terealisasi dengan baik.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" sebesar





11,7%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Pengawas perikanan melaksanakan kegiatan dengan tepat dan cermat, salah satunya dengan menyatukan kegiatan pengawasan yang terkait saat satu sama lain sehingga pelaksanaan lebih efektif dan efisien.

IKU 1 (satu) “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”, terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

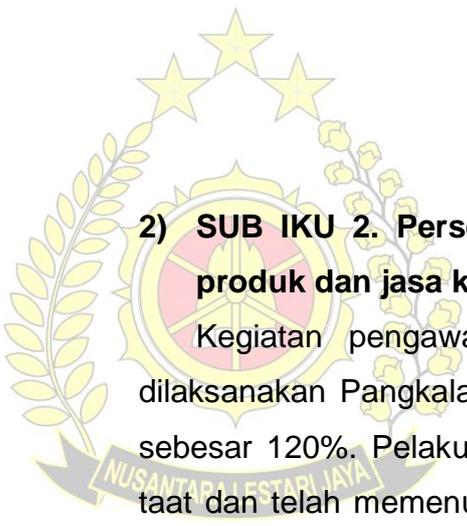
1) SUB IKU 1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendik Cites (%)

Capaian SUB IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendik Cites (%)” sampai dengan tahun 2021 adalah 7 pelaku usaha dengan target adalah 3 pelaku usaha. Selama periode 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pengawasan terhadap jenis ikan yang termasuk dalam kategori Appendix II cites dan ikan yang dilindungi yaitu diantaranya hiu batu (*Chiloscyllium punctatum*), ikan Arwana Merah Emas (Golden Red), Pari Lontar (*Rhincobatus, Sp.*), ikan Pari Gitar, Guitarfish (*Glaucostegus typus*), ikan Pari Gergaji (*Pristis Zijron*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), Hiu Kepala Martil (*Sphyrna spp.*), dan ikan Jardinii Arowana. Pengawasan jenis ikan dilindungi tersebut dilaksanakan di sekitar daerah Jawa barat, Banten dan Lampung terhadap 7 pelaku usaha.

Periode tahun 2020 Sub IKU ini terealisasi sebesar 17 pelaku usaha dengan capaian 120% sedangkan pada tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 7 pelaku usaha. Berdasarkan jumlah Sub IKU ini mengalami penurunan sebanyak 10 pelaku usaha. SUB IKU ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan target yaitu pengukuran berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan pemenuhan Surat Perintah Tugas (SPT), form pemeriksaan, dan laporan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan capaian tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kegiatan pengawasan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendik Cites.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 3 pelaku usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 7 pelaku usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.





2) SUB IKU 2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan (%)

Kegiatan pengawasan terkait pemanfaatan produk dan jasa kelautan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 17 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Pelaku usaha yang diperiksa sampai dengan periode 2021 dikatakan taat dan telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan oleh pengawas perikanan sehingga pada Sub-IKU telah mencapai target sebesar 100%.

Pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir dan industri impor garam berada di Jak

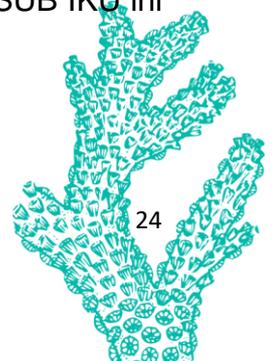
arta dan Banten dengan jumlah 5 pelaku usaha. Sedangkan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan BMKT dan wisata bahari dengan jumlah 12 pelaku usaha yang berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

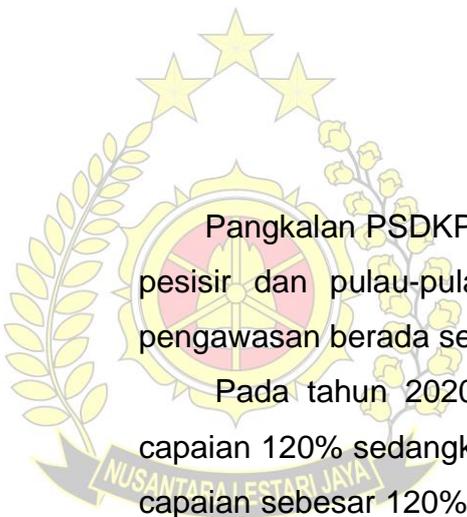
Pada tahun 2020, SUB IKU ini telah terealisasi sebesar 55 pelaku usaha sedangkan pada tahun ini telah terealisasi sebanyak 17 pelaku usaha dengan capaian 120%. Berdasarkan jumlah Sub IKU ini mengalami penurunan sebanyak 38 pelaku usaha. SUB IKU ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan target yaitu pengukuran berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan pemenuhan Surat Perintah Tugas (SPT), form pemeriksaan, dan laporan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan capaian tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kegiatan pengawasan pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 15 pelaku usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 17 pelaku usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

3) SUB IKU 3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Ruang Laut (%)

SUB IKU ini didapatkan dari kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dan ruang laut (%). Hasil dari pengawasan tersebut didapatkan 18 pelaku usaha yang telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan dengan capaian pada SUB IKU ini sebesar 120%.





Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 18 pelaku usaha lokasi pengawasan berada sekitar provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

Pada tahun 2020 SUB IKU ini terealisasi sebanyak 57 pelaku usaha dengan capaian 120% sedangkan pada tahun ini terealisasi sebanyak 18 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. IKU ini mengalami penurunan sebanyak 39 pelaku usaha. SUB IKU ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan target yaitu pengukuran berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan pemenuhan Surat Perintah Tugas (SPT), form pemeriksaan, dan laporan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan capaian tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kegiatan pengawasan kepatuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Ruang Laut.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 10 pelaku usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 18 pelaku usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

4) SUB IKU 4. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (%)

SUB IKU ini didapatkan dari kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Hasil dari pengawasan sampai dengan tahun 2021 didapatkan 34 pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan limbah dan telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan. SUB IKU ini telah mencapai target tahun 2021 sebesar 120%. Kegiatan Pengawasan pengelolaan limbah usaha perikanan dan non perikanan dilaksanakan di daerah sekitar DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

Pada tahun 2020 SUB IKU ini terealisasi sebanyak 36 pelaku usaha sedangkan pada tahun ini terealisasi sebanyak 34 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. SUB IKU ini mengalami penurunan sebanyak 2 pelaku usaha. SUB IKU ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan target yaitu pengukuran berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan pemenuhan Surat Perintah Tugas (SPT), form pemeriksaan, dan laporan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan capaian tahun 2021 Pangkalan





PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kegiatan pengawasan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 26 pelaku usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 34 pelaku usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

5) SUB IKU 5. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan penangkapan ikan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* (%)

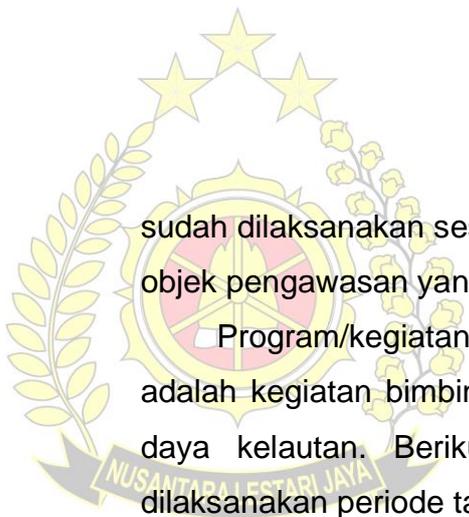
SUB IKU ini telah terealisasi sebanyak 60 pelaku usaha dengan capaian 120%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan *Destructive Fishing* terhadap 60 pelaku usaha dan 50 pelaku usaha diantaranya dikatakan taat. Hasil pengawasan selama tahun 2021 terdapat 10 pelaku usaha yang tertangkap tangan saat pelaksanaan tugas operasi di Jawa barat dan Banten dikarenakan menggunakan alat tangkap strum. Pelaku usaha tidak taat diberikan sosialisasi terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Pada tahun 2020 SUB IKU ini terealisasi sebanyak 26 pelaku usaha dengan capaian 120% sedangkan pada tahun ini terealisasi sebanyak 60 pelaku usaha dengan capaian 120%. IKU ini mengalami peningkatan sebanyak 34 pelaku. SUB IKU ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan target yaitu pengukuran berdasarkan tahapan pemeriksaan dengan pemenuhan Surat Perintah Tugas (SPT), form pemeriksaan, dan laporan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan capaian tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam kegiatan kepatuhan penangkapan ikan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 25 pelaku usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 60 pelaku usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

Alokasi anggaran untuk IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha] sebesar Rp 449.126.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 446.617.887. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU 1 (120%) dan realisasi anggaran (99,44%) dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan





sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tidak membayarkan transport lokal untuk lokasi objek pengawasan yang berada dalam kawasan unit kerja.

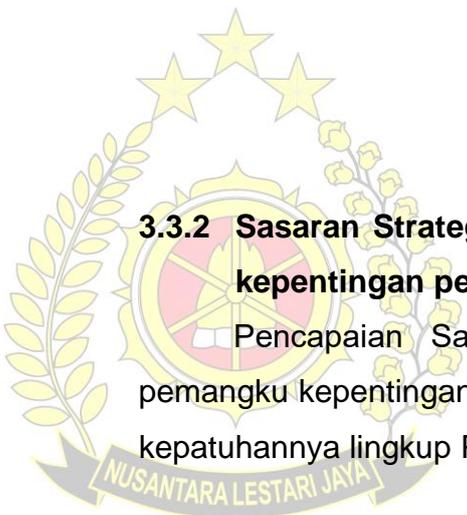
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2021 :

Tabel 9. Rekapitulasi Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat terkait Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	No. SPT
1.	Bimbingan Teknis terkait Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	3-4 Februari	Aula PPN Karangantu	146/Lan.3/TU.4 21/III/2021
2	Bimbingan Teknis terkait Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	17-18 Februari	UPTD Pengawasan SDKP Wilayah Utara Jawa Barat	230/Lan.3/TU.4 21/III/2021
3	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Pencemaran Perairan	27 April 2021	Aula Pertemuan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon	609/Lan.3/TU.4 21/IV/2021
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengelolaan Jasa Kelautan	5 - 6 Mei 2021	Kantor UPTD PSDKP Wilayah Selatan DKP Provinsi Jawa Barat	649/Lan.3/TU.4 21/V/2021
5	Diklat Peningkatan Kemampuan Pengawas untuk Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Menggunakan GIS	2 - 6 Mei 2021	Amaris Hotel Padjajaran Bogor, Jl. Raya Pajajaran no. 25 Kota Bogor	607/Lan.3/TU.4 21/IV/2021

Efisiensi pengguna sumberdaya juga dilakukan pada kegiatan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha], dengan cara kantor Pangkalan PSDKP Jakarta tidak membayarkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di kawasan muara baru.





3.3.2 Sasaran Strategis 2, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan” yaitu Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha].

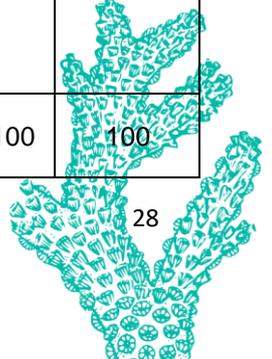
IKU 2 "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pada periode ini, IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terealisasi sebesar 100 %.

IKU Jumlah Unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) Sub IKU, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	SUB IKU	2020			2021			2024
		TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)	
1.	Persentase Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Unit Usaha Budidaya hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang – undangan (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan. (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100	100	100	100	100





Dari data diatas, capaian IKU pelaku usaha perikanan pada tahun 2021 sudah mencapai 100% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi sesuai dengan target. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan sesuai dengan tahap pemeriksaan.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 0,3%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Pengawas perikanan melaksanakan kegiatan dengan tepat dan cermat, salah satunya dengan menyatukan kegiatan pengawasan yang terkait saat satu sama lain sehingga pelaksanaan lebih efektif dan efisien.

IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung 4 (empat) kegiatan Sub IKU yaitu sebagai berikut :

1) SUB IKU 1. Persentase Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional

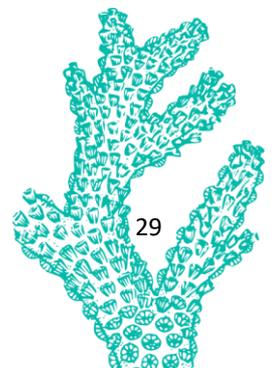
Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional didapatkan dari tahapan pemeriksaan surat perintah tugas, berita acara/form pemeriksaan, dan laporan kegiatan. Penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Perhitungan penilaian kapal perikanan yang taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Berdasarkan manual IKU, kapal perikanan yang diperiksa laik operasional adalah kapal perikanan yang telah memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana pada tabel diatas. Realisasi kapal perikanan yang diperiksa laik operasional sampai dengan tahun 2021 adalah 100% dengan jumlah kapal perikanan yang telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN sebanyak 5196 unit kapal.

Pemeriksaan kapal perikanan dilakukan dalam rangka penerbitan HPK dan SLO Lingkup Pangkalan PSD KP Jakarta. Penerbitan HPK dan SLO periode triwulan III dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :



Tabel 12. Penerbitan HPK dan SLO Periode Tahun 2021 Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No.	Nama Satwas	Jumlah		
		HPK A	HPK B	SLO
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	9.918	10.270	9.818
2	Satwas SDKP Pandeglang	209	701	200
3	Satwas SDKP Serang	923	969	880
4	Satwas SDKP Pesawaran	3.054	2.977	2.977
5	Satwas SDKP Cirebon	2.340	2.706	2.425
6	Satwas SDKP Sukabumi	794	839	835
Total		17.238	18.462	17.135

Pada tahun 2020 Sub IKU ini terealisasi sebesar 4572 unit kapal jika dibandingkan dengan capaian pada tahun ini, SUB IKU ini mengalami peningkatan. Peningkatan frekuensi kapal terjadi karena pada tahun 2020, kegiatan nelayan dalam penangkapan ikan terkena dampak dari pandemic COVID-19, sehingga aktivitas nelayan berkurang.

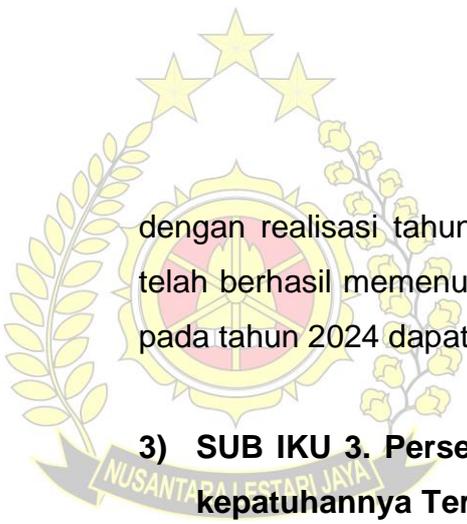
Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 3825 kapal perikanan pada tahun 2021 dan 4125 kapal perikanan pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 5196 kapal perikanan, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan dan kemungkinan besar capaian pada tahun 2024 dapat terpenuhi.

2) SUB IKU 2. Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangn

SUB IKU 2 Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangn didapatkan dari hasil pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 45 unit usaha skala besar dan 59 unit usaha skala kecil dengan jumlah 103 unit usaha yang keseluruhan usahanya dikatakan taat. Hasil pengawasan telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN. Pengawasan kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dilakukan di daerah sekitar Lampung, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Pada tahun 2020 unit usaha yang diperiksa sebanyak 101 unit usaha dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun ini yaitu 103 unit usaha dengan capaian 100%. Sub-IKU ini mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2021 pengawasan pada UPI skala kecil lebih banyak daripada tahun 2020.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 95 unit usaha pada tahun 2021 dan 98 unit usaha pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan



dengan realisasi tahun 2021 yaitu 103 unit usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan dan kemungkinan besar capaian pada tahun 2024 dapat terpenuhi.

3) SUB IKU 3. Persentase Unit Usaha Budidaya hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - undangan

Pengawasan unit usaha budidaya hasil perikanan terdiri dari unit usaha budidaya umum dan air tawar, serta unit usaha budidaya air laut dan air payau. Realisasi unit usaha budidaya yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada periode tahun 2021 adalah 100% dengan jumlah 156 unit usaha yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN. Pengawasan unit usaha budidaya dilaksanakan di Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

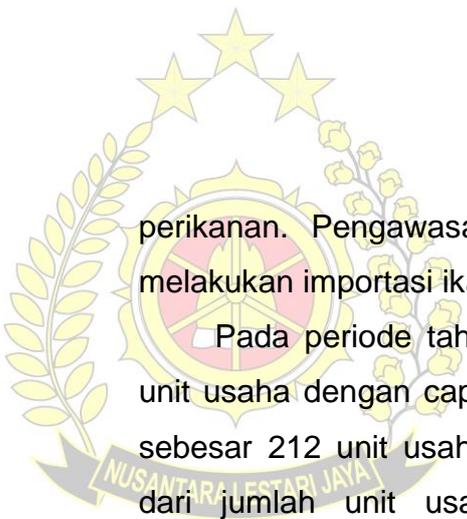
Pada tahun 2020 unit usaha budidaya yang diperiksa sebesar 143 unit usaha dengan capaian sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 156 unit usaha dengan capaian 100%. Peningkatan jumlah pelaku usaha budidaya perikanan yang diperiksa karena bertambahnya jumlah pelaku usaha budidaya baru sehingga sub-IKU ini mengalami peningkatan dari jumlah unit usaha yang diawasi dan Pangkalan PSDKP Jakarta mampu memenuhi capaian sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 91 unit usaha pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 143 unit usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan dan kemungkinan besar capaian pada tahun 2024 dapat terpenuhi.

SUB IKU 4. Persentase Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan. (%)

Realisasi Persentase Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan (%) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada periode tahun 2021 adalah 100% dengan jumlah 212 unit usaha yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN. Distribusi dibagi menjadi distribusi ekspor dan impor. Pengawasan Distribusi ekspor dilakukan melalui penerbitan lembar verifikasi pendaratan ikan (LVHPI) dimana sampai dengan tahun 2021 telah terbit LVHPI untuk 184 unit kapal





perikanan. Pengawasan distribusi impor dilakukan terhadap 28 unit usaha yang melakukan importasi ikan.

Pada periode tahun 2020 jumlah unit usaha distribusi diperiksa sebanyak 180 unit usaha dengan capaian sebesar 100% sedangkan pada tahun ini telah terealisasi sebesar 212 unit usaha dengan capaian 100%. Sub-IKU ini mengalami peningkatan dari jumlah unit usaha yang diawasi dan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 86 unit usaha pada tahun 2021 dan 89 unit pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 212 unit usaha, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan dan kemungkinan besar capaian pada tahun 2024 dapat terpenuhi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2021 :

Tabel 13. Rekapitulasi Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat terkait Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	No. SPT
1	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	04 - 05 Maret 2021	Hotel Santika Cirebon	299/Lan.3/TU .421/III/2021
2	Bimbingan Teknis Pengawasan Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2021	06 - 09 April 2021	BPPI Semarang	481/Lan.3/TU .421/IV/2021
3	Bimbingan Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Komoditas Ikan Jenis Tertentu	27 - 29 Mei 2021	Jln. Karang Bolong No.KM.139, Karang Suraga, Kec. Cinangka, Serang, Banten	734/Lan.3/TU .421/V/2021

Alokasi anggaran sampai dengan tahun 2021 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan





PSDKP Jakarta (%) sebesar Rp 1.342.489.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.337.910.973 (99,66%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,66% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

3.3.3 Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat” terdiri dari IKU Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) yaitu:

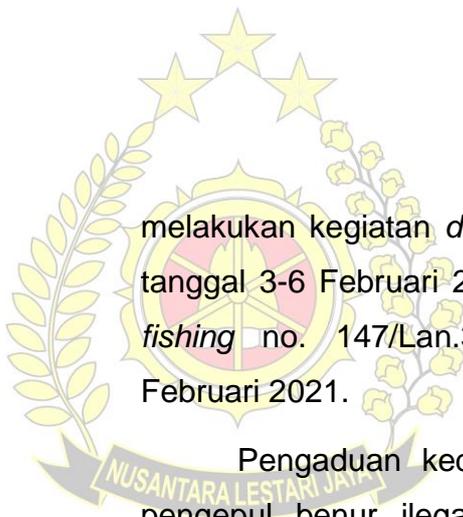
IKU 3 "Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU “Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut pengaduan atau laporan masyarakat yang berasal dari POKMASWAS melalui Aplikasi LAPOR!, Surat, Kotak Pengaduan, Surat Elektronik (e-mail), Media Sosial, SMS Gateway atau langsung ke pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Sampai dengan tahun 2021, terdapat 4 (empat) pengaduan dari POKMASWAS Padaherang dan Anonim yang melaporkan pengaduan menggunakan aplikasi LAPOR dan sudah ditindaklanjuti.

Pengaduan pertama terkait penggunaan alat penangkap ikan strum di Pangkalan dengan melaporkan melalui media sarana pengaduan resmi milik Pangkalan PSDKP Jakarta pada bulan Februari 2021. Pengaduan tersebut sudah di tindak lanjut oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan *destructive fishing* yang kemudian dilaksanakan penyerahan alat penangkapan ikan secara sukarela berupa strum ikan sebanyak 5 unit serta dilanjutkan dengan deklarasi masyarakat desa Sukanagara yang berjanji tidak akan





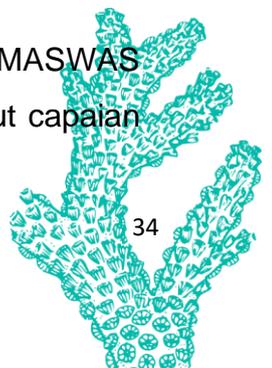
melakukan kegiatan *destructive fishing*. Tindak lanjut pengaduan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Februari 2021 dengan surat tugas tindak lanjut pengawasan *destructive fishing* no. 147/Lan.3/TU.421/III/2021 dan 149/Lan.3/TU.421/III/2021 tanggal 2 Februari 2021.

Pengaduan kedua didapatkan dari anonim yang melaporkan tentang para pengepul benur ilegal di kabupaten Cianjur pada tanggal 28 Juni 2021, hasil pengaduan diterima admin penghubung dan telah ditindaklanjuti dengan memorandum kepada Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta dan diteruskan ke Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran untuk di dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dikarenakan adanya himbauan untuk melaksanakan *physical distancing* dan mengurangi kegiatan tatap muka yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 dan melihat tanggal pengaduan yang berada di penghujung bulan Juni sehingga ditindak lanjut dengan arahan dari pimpinan dalam bentuk memorandum dan pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Pengaduan ketiga diterima Pangkalan PSDKP Jakarta melalui SMS Gateway POKMASWAS pada tanggal 16 Agustus 2021. Pengaduan ini terkait laporan lanjutan dari pengaduan pertama yang telah selesai ditindaklanjuti yaitu laporan dari POKMASWAS Padaherang, Jawa Barat. Laporan telah di tindaklanjuti dengan arahan pimpinan melalui memorandum dan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada bulan Oktober dikarenakan mengikuti jadwal kegiatan pengawasan.

Pengaduan keempat berasal dari media pengaduan LAPOR! yang diajukan pada bulan November 2021 oleh Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kuala Teladas yang mengadukan aktivitas menambang pasir yang merusak lingkungan hidup oleh PT. CAM dan PT. MAMS di Lampung. Pengaduan yang dilaporkan sudah ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selaku otoritas dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan jarak kurang dari 12 mil laut, setelah seluruh informasi dokumen perizinan telah lengkap maka akan dilakukan proses pemanggilan dan klarifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut.

Capaian yang diperoleh dari persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS adalah 100% dikarenakan 4 (empat) pengaduan telah ditindaklanjuti. Berikut capaian persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS pada tabel dibawah ini :





Tabel 14. Capaian Persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target [%]	Realisasi [%]	%	Target [%]	Realisasi [%]	%	
Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	70	100	120	71	100	117	75

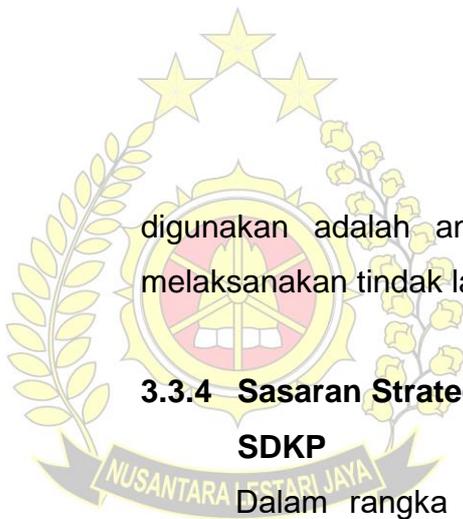
Pada tahun 2020 IKU ini terealisasi sebanyak 2 pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan capaian 100% sehingga berdasarkan kuantitas tahun ini mengalami peningkatan dan secara capaian persentase IKU ini sudah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan dan dapat mempertahankan kinerja dari tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan sebesar 71% pada tahun 2021 dan 75% pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 100%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Dilihat dari capaian IKU persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas periode 2020-2021 kemungkinan besar IKU ini dapat tercapai pada tahun 2024.

Alokasi anggaran untuk IKU Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta sebesar Rp.12.600.000. Realisasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 12.460.000 sehingga telah tercapai 99%.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” sebesar 42%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Kegiatan ini berkaitan dengan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan pengaduan sehingga sebagian anggaran yang





digunakan adalah anggaran pengawasan dan Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan tindak lanjut sesuai prosedur kegiatan dan waktu.

3.3.4 Sasaran Strategis 4, Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada

SDKP Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

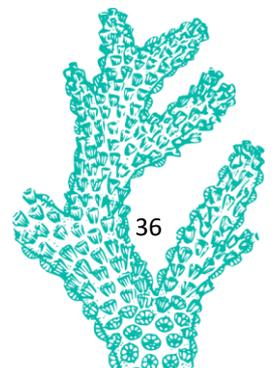
IKU 4 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

Realisasi untuk cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas adalah 2,08. Nilai diperoleh dari perhitungan hari operasi dan jam layar KP. Hiu 10 dan KP Hiu 06.

Tabel 15. Capaian Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	0,4	0,83	120	1,60	2,08	120	0,48

IKU ini merupakan persentase hasil perbandingan frekuensi operasi kapal pengawas, periode operasi kapal pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm), kecepatan dinas (nm/jam), lama waktu pengawasan (jam), factorkoreksiaktual WPPNRI, factor koreksi aktual kapal pengawas dengan Luas area WPPNRI.





$$x_{kp} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{wpp} \cdot f_{kp}}{A} \right\} \times 100\%$$

Keterangan :

- x_{kp} = coverage area kapal pengawas
- N = frekuensi operasi Kapal Pengawas
- i = periode operasi Kapal Pengawas
- d = jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (15 nm)
- v = kecepatan dinas (15 nm/jam)
- t = lama waktu pengawasan (jam)
- f_{wpp} = faktor koreksi aktual WPPNRI
- f_{kp} = Faktor koreksi aktual Kapal Pengawas
- A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm²

Berikut tabel perhitungan cakupan teoritis dan jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta :

Tabel 16. Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Total Hari	Jam Operasi/ (jam) (t)	Kec. Dinas NM/Jam (v)	Jangkauan Efektif Radar (d)	Cakupan Teoritis (d*v*t)
1	Hiu 10	110	1229	15	15	276525
2	Hiu 06	90	1003	15	15	225675
	Total	200	2232			276525

Dari data diatas terdapat total jam operasi dari kapal pengawas sebesar 2232 jam. Nilai cakupan teoritis diperoleh dari perkalian jangkauan efektif radar (d) dengan nilai ketetapan 15 NM, kecepatan dinas (v) dengan nilai ketetapan 15 NM/Jam. Nilai tersebut menjadi dasar perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17. Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan Teoritis (X)	Luas Wilayah WPPNRI (A)	Cakupan Aktual ((Fwpp*Fkp*X)/A)*100
1	Hiu 10	0,4	0,2	276525	1928506	1,15
2	Hiu 06	0,4	0,2	225675	1928506	0,94
	Total					2,08



Dari tabel diatas diketahui faktor koreksi cakupan aktual per WPPNRI (Fwpp) Hiu 10 dan Hiu 06 adalah 0,4 yaitu berdasarkan nilai wilayah pengelolaan perikanan 712 yang dilakukan Hiu 10 dan Hiu 06. Faktor koreksi kapal (Fkp) Hiu 10 dan 06 adalah 0,2. Jumlah luas perairan laut merupakan jumlah 11 Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) yaitu 1.928.506, dari data diatas didapatkan nilai persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 2,08%. Realisasi periode ini sudah memenuhi lebih dari target yaitu 1,6% sehingga dapat disimpulkan persentase lebih dari 120%.

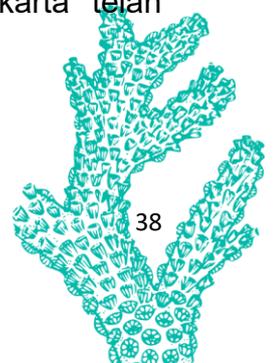
Pada tahun 2020 IKU ini telah teralisasi sebesar 0,83 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2,08 maka tahun ini mengalami peningkatan. Meningkatnya realisasi pada tahun 2020 dikarenakan kegiatan operasional kapal pengawas hanya didukung oleh 1 armada yaitu Hiu 10.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 sebesar 0,42 sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 2,08 maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, target yang ditentukan sebesar 0,48 diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2020-2021 sehingga kegiatan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dapat terealisasi dengan baik.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" sebesar 30,8%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 6.474.521.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.420.643.480,- (99,17%). Efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah bertambahnya hari operasi kapal pengawas yang semula target pengawasan selama 95 hari sampai dengan periode ini telah terlaksana selama 200 hari.

3.3.5 Sasaran Strategis 5, Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

Dalam rangka pencapaian SS "Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat", Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :





IKU 5 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/ Rubberboat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) merupakan nilai dari perbandingan frekuensi operasi *Speedboat* Pengawas, periode operasi *Speedboat* Pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual *Speedboat* dengan Luas area WPPNRI.

$$x_{sb} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{sb}}{A} \right\} \times 100\%$$

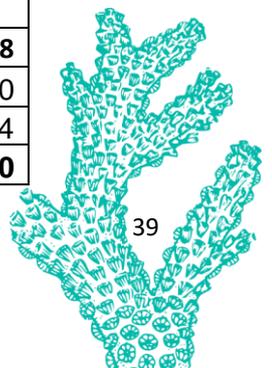
Keterangan :

- x_{sb} = coverage area speedboat pengawas
- n = frekuensi operasi Speedboat Pengawas
- i = periode operasi Speedboat Pengawas
- d = jangkauan pemantauan melalui radar/ penglihatan visual (nm)
- v = kecepatan dinas (nm/jam)
- t = lama waktu pengawasan (jam)
- f_{sb} = faktor koreksi aktual Speedboat = 0,1
- A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm²

Berikut tabel perhitungan cakupan teoritis dan jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta :

Tabel 18. Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Speedboat/RIB/Rubberboat

No	Nama Kapal	Total Hari	Jam Operasi/ (jam) (h)
1	Napoleon 06	42	252
2	Napoleon 14	42	252
3	Napoleon 52	42	252
4	Dolphin 04	59	295
5	Dolphin 22	25	125
6	RIB	42	210
7	RIB 2	-	-
8	Rubber Boat	42	252
		232	
Total			1638
Kec. Dinas NM/Jam (v)			10
Jarak Pandang (d)			4
Cakupan Teoritis (d x v x h)			65520





Dari data diatas terdapat total jam operasi dari speedboat sebesar 65520 jam. Nilai cakupan teoritis diperoleh dari perkalian jangkauan efektif radar (d) dengan nilai ketetapan 4, kecepatan dinas NM/Jam (v) dengan nilai ketetapan 10, dan jam operasi (h) yaitu 1638 jam. Dari nilai diatas diketahui nilai cakupan teoritis sebesar 65520. Nilai tersebut menjadi dasar perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19. Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI Speedboat/RIB/Rubberboat

Cakupan Teoritis (CT)	65520
Faktor Koreksi Aktual Speedboat (Fsb)	0,1
$\frac{CT \times Fsb}{Luas WPPNRI} \times 100\%$	Aktual = 6552 -----x100% 1928506
Nilai Persentase	0,34%

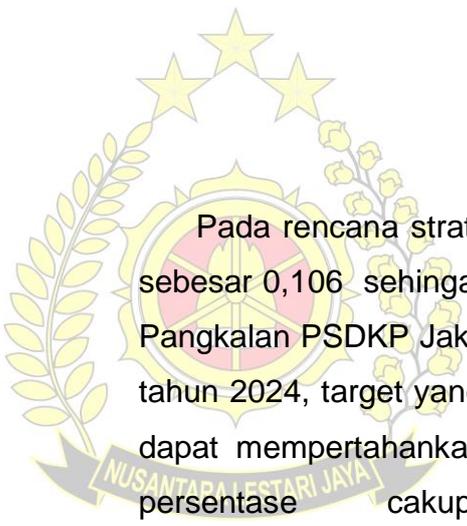
Dari tabel diatas diketahui persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 0,34%. Realisasi periode ini sudah memenuhi lebih dari target yaitu 0,30% sehingga dapat disimpulkan persentase lebih dari 114%.

Tabel 20. Capaian Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	0,104	0,35	120	0,30	0,34	114	0,2

Pada tahun 2020, IKU ini terealisasi sebesar 0,35% dengan capaian sebesar 120% jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu 0,34% dengan capaian 114% maka capaian tahun ini dikatakan menurun. Penurunan pada IKU ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat speedboat yang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan serta 1 speedboat dalam proses penghapusan.





Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 sebesar 0,106 sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 0,34 maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, target yang ditentukan sebesar 0,2 diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2020-2021 sehingga kegiatan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dapat terealisasi dengan baik.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” sebesar 14,3%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 1.140.581.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.129.212.925,- (99%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 114% dan realisasi anggaran sebesar 99% terdapat efisiensi yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

3.3.5 Sasaran Strategis 5, Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

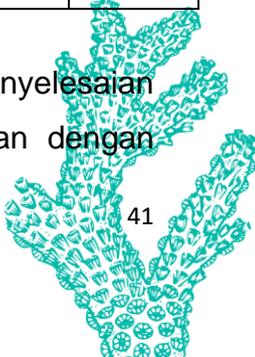
Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

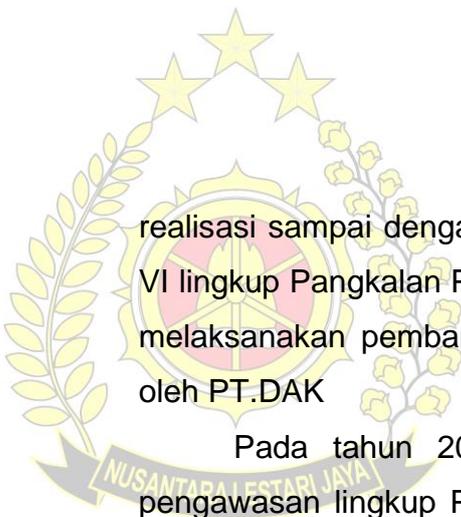
IKU 6 “Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Tabel 21. Capaian persentase penyelesaian pembangunan kapal kelas VI

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	60,16	97,86	120	-

Kegiatan ini merupakan instrumen dalam memantau penyelesaian pembangunan kapal pengawas kelas VI. IKU ini akan telah dilaksanakan dengan





realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 97,86. Target pembangunan kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 1 unit. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pembangunan kapal kelas VI dengan pihak penyedia yang dilakukan oleh PT.DAK

Pada tahun 2020, IKU persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada IKU ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra 2020-2024.

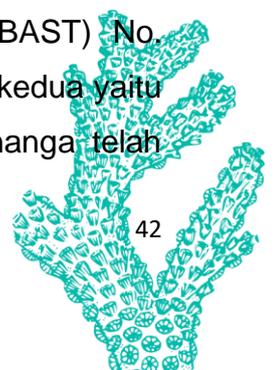
Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas VI lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 64,8%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 195.080.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 191.003.405,- (97,91%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

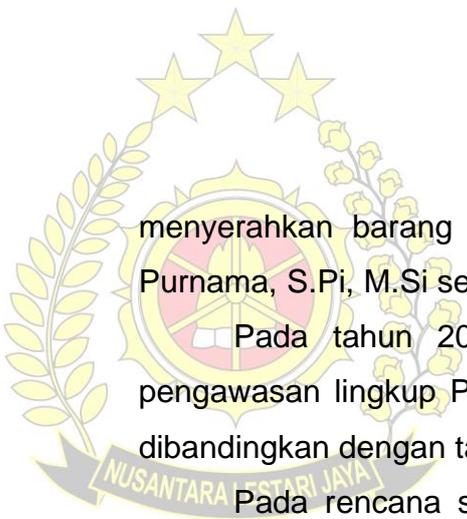
IKU 7 “Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Tabel 22. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana

IKU	2020			2021			2024 (unit)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	100	100	100	1

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pembangunan prasarana pengawasan lingkup adalah pembangunan pos pengawasan di Wilker SDKP Pangdaran selama 147 hari kalender. Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 1153/PPK-Lan.3/XI/2021 tanggal 18 November sebagai tanda bahwa pihak kedua yaitu M. Anggun Varadiansyah, ST, MM selaku Direktur CV. Surya Putra Kenanga telah





menyerahkan barang hasil pengadaan kepada pihak kesatu yaitu Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si selaku PPK Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada tahun 2020, IKU persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 adalah 1 unit bangunan/pos pengawasan yang dibangun sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu pembangunan 1 pos di pos Wilker SDKP Pangandaran maka Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat kembali melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

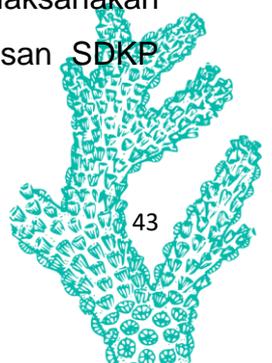
Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 0,6%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 777.047.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 772.263.982,- (99,38%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

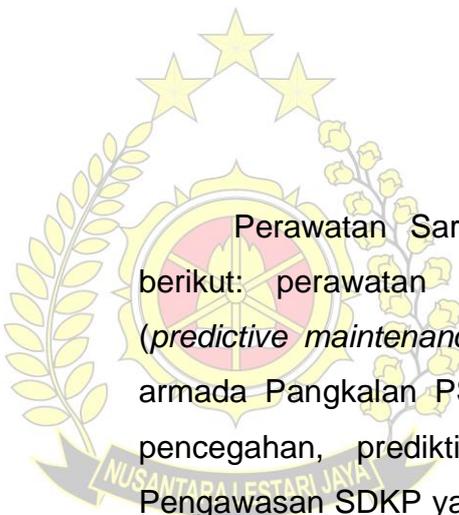
IKU 8 “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Tabel 23. Capaian Persentase Penyelesaian perawatan sarana

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	100	100	100	-

Perawatan sarana pengawasan SDKP yang selesai dirawat yang dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Jakarta adalah 8 unit. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 7(tujuh) unit.





Perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Seluruh armada Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan perawatan baik perawatan pencegahan, prediktif dan darurat. Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Perawatan Armada Pengawas Pangkalan Psdkp Jakarta Tahun 2021

No	Armada	Perawatan		
		Pencegahan (preventive)	Prediktif (predictive)	Darurat (Breakdown Maintenance)
1	KP. Hiu 06	√	√	√
2	KP. Hiu 10	√	√	√
3	SP. Napoleon 006	√	√	√
4	SP. Napoleon 052	√	√	√
5	SP. Napoleon 014	√	√	√
6	Dolphin 04	√	√	√
7	Dolphin 022	√	√	√
8	Searider	√	√	√
9	Rubberboat	√	√	√

Pada tahun 2020, IKU persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Pada tahun 2024 diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat kembali melaksanakan kegiatan perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebagai salah satu bentuk monitoring terhadap kondisi armada kapal pengawas dan *speedboat*.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" sebesar 0,4%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 4.816.268.000 dan telah terealisasi sebesar 4.795.401.818 (99,57%).





Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

3.3.6 Sasaran Strategis 6, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 6 :

IKU 9 “Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

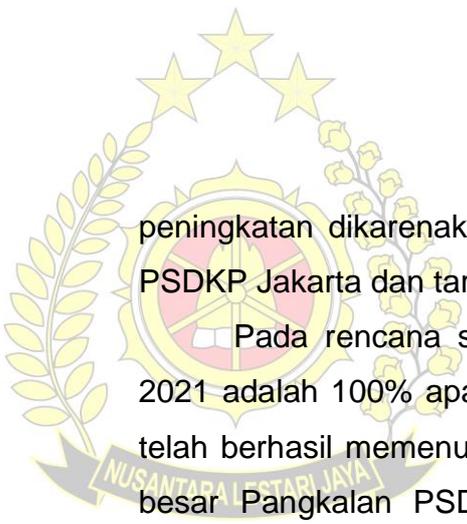
Tabel 25. Persentase penyelesaian penyidikan TPKP

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	93	100	108	100

Pencapaian target indikator kinerja adalah jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta. Sampai dengan triwulan III terdapat 2 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KM.Ulam Sari dan KM.Putra Safik. KM Ulam Sari dan KM Putra Safik telah melakukan operasional penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan (*Fishing Ground*). Penyidikan TPKP sampai dengan tahun 2021 telah selesai sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada tanggal 24 Juni 2021 sehingga dapat dikatakan Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi target yaitu 93% dengan capaian 108%.

Pada tahun 2020, IKU persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terealisasi sebesar 100% dikarenakan tidak ada kasus pada tahun tersebut, sehingga apabila sampai dengan akhir tahun tidak kasus sesuai dengan manual iku persentase capaian menjadi 100%. Pada tahun 2021, IKU ini mengalami





peningkatan dikarenakan pada tahun ini terdapat 2 kasus yang ditangani Pangkalan PSDKP Jakarta dan target yang ditentukan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 adalah 100% apabila dibandingkan dengan tahun ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat menyelesaikan penyidikan TPKP apabila terdapat kasus yang masuk pada periode tahun berikutnya.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 17,7%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 49.250.0000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.219.000,- (89,8%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama pandemic Covid-19.

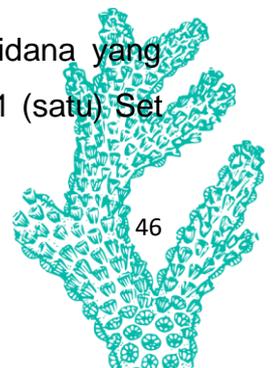
IKU 10 “Persentase Penyelesaian Penanganan Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

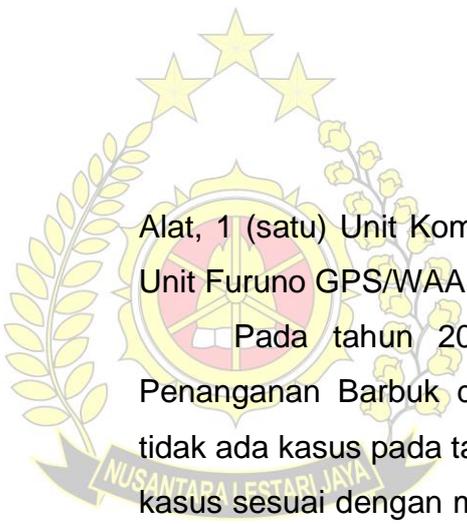
Tabel 26. Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk

IKU	2020			2021			2024 (%)
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	
Persentase Penyelesaian Penanganan Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	100	93	100	108	93

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta 108%. Kegiatan ini telah terealisasi dengan adanya kasus pelanggaran wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*) oleh KM.Ulam Sari dan KM.Putra Safik.

Barang bukti yang disita Pangkalan PSDKP Jakarta terkait tindak pidana yang dilakukan KM. Ulam Sari adalah 1 (satu) Unit Kapal KM. ULAM SARI HR, 1 (satu) Set





Alat, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Alat Komunikasi SSB ICOM IC-707, 1 (satu) Unit Furuno GPS/WAAS, 1 (satu) Bundel Dokumen KM. ULAM SARI.

Pada tahun 2020, IKU persentase Persentase Penyelesaian Penanganan Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP terealisasi sebesar 100% dikarenakan tidak ada kasus pada tahun tersebut, sehingga apabila sampai dengan akhir tahun tidak kasus sesuai dengan manual iku persentase capaian menjadi 100%. Pada tahun 2021, IKU ini mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun ini terdapat 2 kasus yang ditangani Pangkalan PSDKP Jakarta.

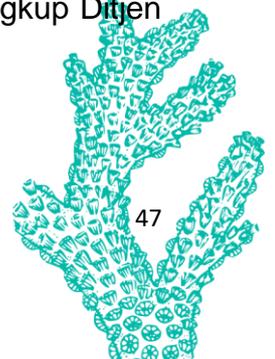
Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target yang ditentukan pada tahun 2021 adalah 93% apabila dibandingkan dengan tahun ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. IKU ini merupakan kegiatan yang situasional sehingga meskipun sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat kasus maka IKU ini akan menyesuaikan dengan keadaan dan realisasi akan menjadi 100%.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Penyelesaian Penanganan Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 0,1%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2021 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 42.080.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 42.025.980,- (99,9%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

3.3.7 Sasaran Strategis 7, Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Dalam rangka pencapaian SS “Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 7 :



IKU 11 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

Tabel 27. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna SLO

IKU	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	88,15	110	80	90,24	113	80

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali, sehingga nilai rata-rata yang didapatkan dari kegiatan SKM selama tahun 2021 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” yaitu sebesar 90,24 dengan capaian sebesar 113%. Berikut adalah rekapitulasi hasil SKM selama tahun 2021 :

Tabel 28. Nilai SKM SLO selama tahun 2021

KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	RATA-RATA
Nilai SKM	90,39	90,49	90,2	89,86	90,24

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survey kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:



SKM Unit Pelayanan x 25

Pelaksanaan Nilai Akhir setelah perhitungan tersebut selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut rekapitulasi unsur penilaian selama tahun 2021 :

Tabel 29. Rekapitulasi Unsur Penilaian Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persyaratan	3,60	3,61	3,35	3,30
2	Prosedur	3,64	3,64	3,48	3,38
3	Waktu Pelayanan	3,52	3,52	3,44	3,45
4	Biaya/Tarif	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,54	3,54	3,57	3,56
6	Kompetensi Pelaksana	3,64	3,64	3,67	3,67
7	Perilaku Pelaksana	3,63	3,63	3,65	3,67
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,53	3,55	3,72	3,73
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,47	3,47	3,62	3,62
	Nilai SKM (Unsur 1*0,111+ Unsur 2*0,111 +.....+Unsur n*0,111)	3,62	3,62	3,61	3,59
	(Nilai SKM*25)	90,39	90,49	90,20	89,86

Dari data diatas dapat disimpulkan terdapat 1 unsur yang nilainya stabil yaitu unsur biaya/tarif dengan nilai maksimal yaitu 4,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa pelayanan tidak pernah diminta biaya/tarif selama pelayanan di Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada tabel 24, terdapat nilai renstra tahun 2021 yaitu 80, jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021 maka nilai IKU ini sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2020 nilai SKM pada pelayanan SLO sebesar 88,15 jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu 90,24 maka tahun ini IKU tersebut dikatakan





meningkat. Pada tahun 2020 penilaian dilakukan tiga kali yaitu semester I, triwulan III dan triwulan IV. Nilai yang didapatkan pada semester I tahun 2020 masi rendah yaitu pada unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 2,82.

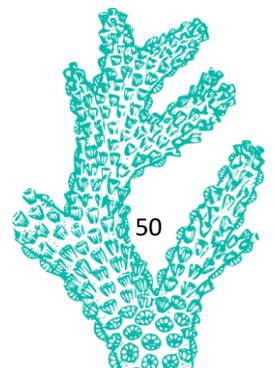
Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” sebesar 17,5%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Kegiatan telah dilaksanakan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama pandemic Covid-19.

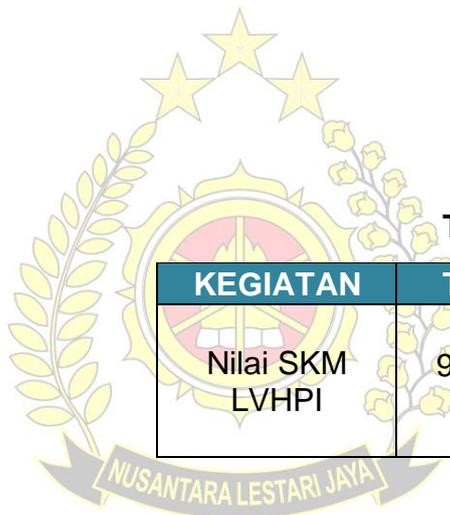
IKU 12 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

Tabel 30. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna LVHPI

IKU	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	-	-	-	80	91,55	114	-

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali, sehingga nilai rata-rata yang didapatkan dari kegiatan SKM selama tahun 2021 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” yaitu sebesar 91,55 dengan capaian sebesar 114%. Berikut adalah rekapitulasi hasil SKM selama tahun 2021 :





Tabel 31. Nilai SKM LVHPI selama tahun 2021

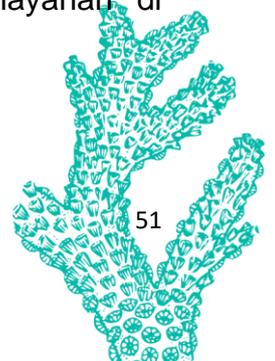
KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	RATA-RATA
Nilai SKM LVHPI	91,71	91,99	91,39	91,09	91,55

Pelaksanaan Nilai Akhir setelah perhitungan tersebut selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut rekapitulasi unsur penilaian selama tahun 2021 :

Tabel 32. Rekapitulasi Unsur Penilaian Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persyaratan	4,00	3,50	3,33	3,30
2	Prosedur	3,55	4,00	3,40	3,35
3	Waktu Pelayanan	3,35	3,50	3,67	3,74
4	Biaya/Tarif	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,55	3,55	3,87	3,83
6	Kompetensi Pelaksana	3,90	3,90	3,60	3,61
7	Perilaku Pelaksana	3,70	3,70	3,80	3,78
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,55	3,65	3,60	3,61
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,50	3,35	3,67	3,61
	Nilai SKM (Unsur 1*0,111+ Unsur 2*0,111 +.....+Unsur n*0,111)	3,67	3,68	3,66	3,64
	(Nilai SKM*25)	91,71	91,99	91,39	91,09

Dari data diatas dapat disimpulkan terdapat 1 unsur yang nilainya stabil yaitu unsur biaya/tarif dengan nilai maksimal yaitu 4,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa pelayanan tidak pernah diminta biaya/tarif selama pelayanan di Pangkalan PSDKP Jakarta.





IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” belum terdapat pada tahun 2020 dan renstra 2021, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” sebesar 19,1%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi Anggaran untuk IKU 11 dan 12 ini sebesar Rp. 17.500.000,-. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) SLO dan LVHPI sudah terealisasi sebesar Rp. 16.680.000,- (95,31%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

IKU 13 “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

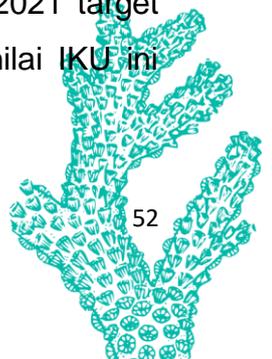
Tabel 33. Capaian Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta

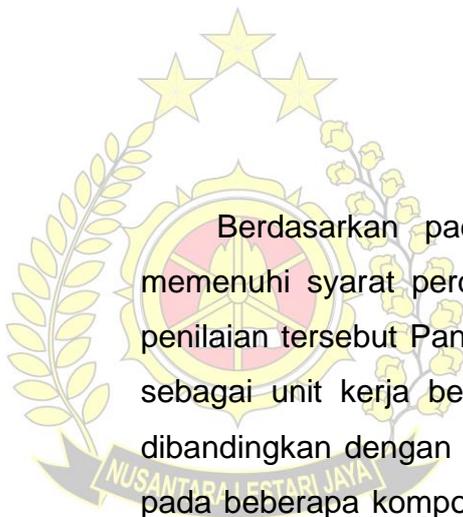
IKU	2020			2021			2024 %
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75	84,99	113	75	79,91	111	75

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta merupakan salah satu UPT yang di canangkan menuju WBK dengan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal KKP (nilai >75).

Pada Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Jakarta telah dinilai oleh tim penilai nasional yaitu Inspektorat Jenderal. Penilaian dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan total nilai sebesar 79,91 yang artinya Pangkalan PSDKP Jakarta masih memenuhi syarat predikat WBK.

Pada tahun 2024, target untuk Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) adalah 75. Di akhir periode renstra diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta masih tetap memenuhi syarat sebagai instansi berpredikat WBK. Pada renstra tahun 2021 target IKU ini adalah 75, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka nilai IKU ini sudah mencapai target yang telah ditentukan.





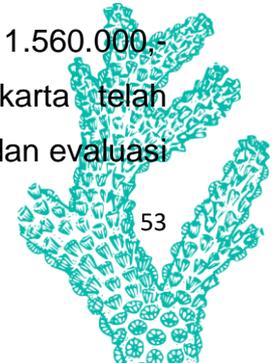
Berdasarkan pada penilaian tahun 2020 Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi syarat predikat WBK yakni > 75 yaitu dengan nilai sebesar 84,99. Atas penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta diberikan penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), apabila dibandingkan dengan tahun 2021, IKU ini mengalami penurunan. Penurunan terdapat pada beberapa komponen penilaian yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas. Berikut perbandingan nilai periode tahun 2020 dan 2021 :

Tabel 34. Perbandingan Nilai Komponen pada LKE Zona Integritas

NO	KOMPONEN	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)
A	PENGIKUT		
1	Manajemen Perubahan	82,00	63,63
2	Penataan Tata Laksana	68,29	76,14
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	87,97	69,30
4	Penguatan Akuntabilitas	72,17	69,10
5	Penguatan Pengawasan	72,31	61,73
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	84,75	69,30
B	HASIL		
	Pemerintah Bersih dan Bebas KKN	97,75	99,05
	Kulaitas Pelayanan Publik	95,00	98,25

Pada tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan. Komponen yang mengalami penurunan diantaranya adalah Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penurunan terjadi dikarenakan penilaian dilakukan secara online melalui e-Zona Integritas (ezi.kkp.go.id) sehingga tidak ada konfirmasi data terhadap data dukung atau tidak adanya komunikasi dua arah antara penilai dengan tim zona integritas Pangkalan PSDKP Jakarta selama penilaian tahun 2021.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” sebesar 6,5%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi Anggaran untuk IKU ini sebesar Rp. 1.560.000,- dan sudah terealisasi dalam bentuk laporan pembangunan zona integritas tahun 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (100%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi





secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Kegiatan yang mendukung IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” adalah Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi KKP pada tanggal 6-7 Mei 2021 di ASTON Bogor Hotel & Resort yang diikuti oleh 2 pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

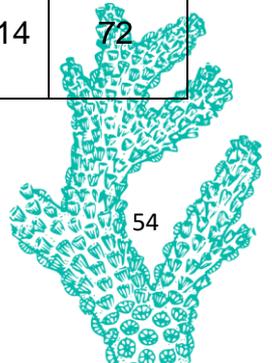
Pengukuran berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4) Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2021. Sampai dengan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui finger print online.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Pengukuran IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun. Berikut tabel capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta.

Tabel 35. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta

IKU	2020			2021			2024 %
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta	72	73,32	102	73	79,69	114	72





Pada periode tahun 2021, IKU “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan tahun 2021 adalah 79,69 dengan capaian sebesar 114%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi target yang di tentukan dengan melakukan update data SDMA, melakukan monev kehadiran pegawai, dan memonitoring pengisian aplikasi e-SKP selama tahun 2021.

Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2020 sebesar 73,32 dengan capaian sebesar 102%, jika dibandingkan dengan tahun ini maka dapat dikatakan tahun ini mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi dikarenakan pegawai yang melakukan diklat 20 jp lebih banyak dari tahun lalu.

Pada tahun 2024, target untuk Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta adalah 72. Di akhir periode renstra diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta masih tetap melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini. Pada renstra tahun 2021 target IKU ini adalah 72, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka nilai IKU ini sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta” sebesar 9,3%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

IKU 15 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan : dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek kesesuaian : dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek ketercapaian : dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)



Tabel 36. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)

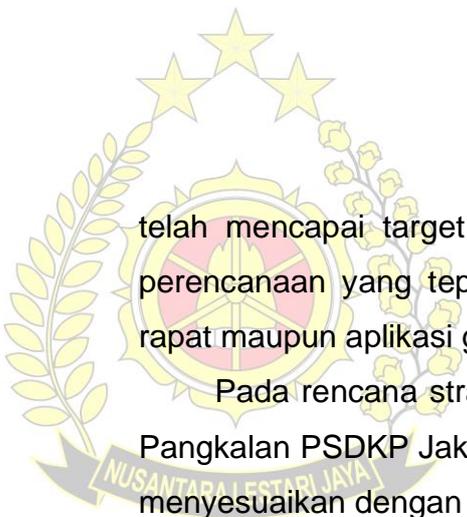
IKU	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90	92,36	103	90	98,22	109	-

Penilaian rekonsiliasi kinerja lingkup DJPSDKP tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2021 melalui daring dan luring. Hasil rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 98,22 dengan capaian 109%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta sebagian besar telah memenuhi 3 aspek pada lembar kerja rekonsiliasi kinerja.

Pada tahun 2020, IKU ini terealisasi sebesar 92,36% dengan capaian sebesar 103%, jika dibandingkan dengan tahun ini maka "IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)" telah meningkat. Peningkatan terjadi dikarenakan nilai pada aspek ketercapaian tahun 2021 lebih tinggi daripada tahun 2020. Nilai ketercapaian diperoleh dari aplikasi Kinerjaku, pada tahun 2020 rata-rata nilai NPSS Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan waktu penilaian sebesar 100,23. Nilai NPSS dipengaruhi oleh capaian setiap indikator kinerja, pada triwulan I dan II tahun 2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu :

TW I		TW II	
Kegiatan	Capaian	Kegiatan	Capaian
IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	99,30%	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	97,28%
IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	80%	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	14,58%
IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	98,75%	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	6,67%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai NPSS tahun 2020 dipengaruhi oleh capaian indikator diatas, sedangkan pada tahun ini seluruh kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta



telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan IKU ini tidak lepas dari perencanaan yang tepat dan koordinasi setiap penanggung jawab IKU baik melalui rapat maupun aplikasi grup *whatsapp*.

Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” sebesar 9,32%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

IKU 16 “Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

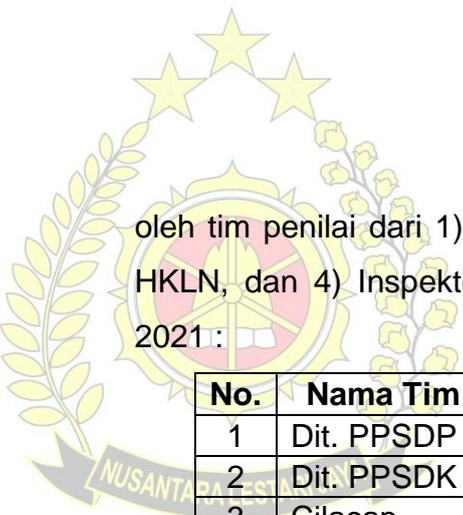
Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Perhitungan jumlah inovasi diperoleh melalui perumusan inovasi dari 5 (lima) Satuan Kerja Pusat. Inovasi dihasilkan menggunakan konsep Gugus Kendali Mutu, yaitu penggunaan 8 (delapan) langkah. Pangkalan wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi.

Tabel 37. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)

IKU	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	-	-	-	1	1	100	-

Periode tahun 2021, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menghasilkan 1 (satu) inovasi berupa penyederhanaan waktu pelayanan HPK/SLO melalui permohonan WA Interaktif (SIPEPI Versi 2021). SIPEPI Versi 2021 telah diikuti dalam lomba inovasi Ditjen. PSDKP tahun 2021 dan mendapatkan peringkat ke-6 (enam) dalam penilaian





oleh tim penilai dari 1) praktisi inovasi nasional internasional, 2) Biro SDMAO, 3) Biro HKLN, dan 4) Inspektorat II. Berikut rekap nilai lomba kategori inovasi GKM Tahun 2021 :

No.	Nama Tim / Perwakilan	Nilai Akumulasi	Predikat Penilaian
1	Dit. PPSDP	87,8	Platinum
2	Dit. PPSDK	86,8	Gold
3	Cilacap	86,2	Gold
4	Dit.PP	85,9	Gold
5	Dit. POA	85,6	Gold
6	Jakarta	85,2	Gold
7	Benoa	84,6	Gold
8	Batam	83,9	Gold
9	Sesditjen. PSDKP	82,5	Gold
10	Tual	81,1	Gold
11	Komite	80,0	Gold
12	Bitung	79,4	Gold

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta mendapatkan nilai 85,2 dengan predikat Gold dan meraih peringkat ke-6 (enam) dari keseluruhan 12 tim atau perwakilan. Jika dibandingkan dengan standar nasional yaitu Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXV & *International Quality & Productivity Convention* (IQPC) 2021 dengan dominan peringkat peserta tim penyaji berpredikat Platinum maka Pangkalan PSDKP Jakarta belum bisa memenuhi inovasi standar nasional.

Pada tahun 2020, IKU Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun ini. Ditahun ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil menyelesaikan tahapan dalam pembuatan sebuah inovasi. Proses yang dilakukan Pangkalan PSDKP Jakarta tidak mudah sehingga menjadi sebuah inovasi yang telah diakui dan layak untuk dinilai. Aplikasi SIPEPI versi 2021 ini dikembangkan oleh tim GKM Pangkalan PSDKP Jakarta dan didukung oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terutama pengawas perikanan sebagai petugas pelayanan yang berkaitan langsung dengan aplikasi ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha dan kegiatan tim GKM yaitu rapat persiapan sampai dengan rapat pelaksanaan serta rapat evaluasi yang diadakan secara berkala dan adanya aplikasi grup WA dengan nama Tim GKM Pangkalan PSDKP Jakarta.



Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

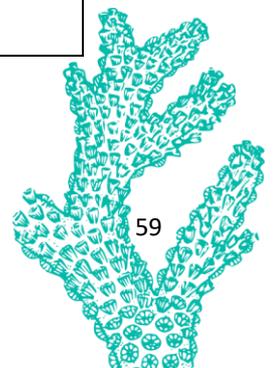
Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” sebesar 0,05%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 34.876.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.860.000 (99,9%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

IKU 17 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan November 2021.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan jumlah nilai dari 5 komponen dalam Lembar Kerja Penilaian (LKE), berikut nilai hasil penilaian pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta:

No	Komponen	Nilai
1	Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (12,5);	10
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25);	25
3	Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (25);	25





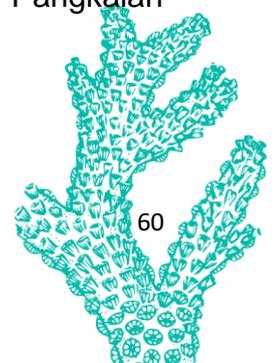
4	Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25);	25
5	Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5).	12,5
TOTAL		97,5

Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 97,5. Capaian yang diperoleh dari target 72,5 adalah 120%.

Pada tahun 2020, IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" telah berhasil dicapai dengan pemenuhan data dukung oleh pegawai yang berkompeten dalam bidang BMN, sehingga lebih mudah dalam pemahaman terkait pemenuhan nilai LKE BMN. Sesditjen PSKDP juga berperan dalam mengontrol proses pengelolaan BMN dengan melaksanakan rapat secara berkala dan memberikan pengingat di aplikasi grup *Whatsapp*.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" sebesar 34,5%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (100%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis yang mendukung kompetensi pegawai dalam penyelesaian data dukung pengelolaan BMN. Berikut rekapitulasi sertifikat yang dimiliki pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Jakarta :





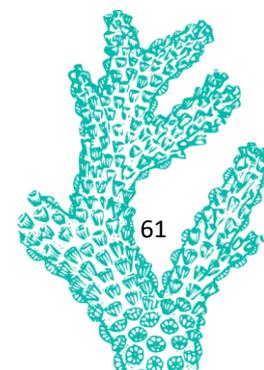
No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana	Nama Pegawai
1	Workshop Pengasuransian Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	02 Februari 2021	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Oktavia
2	Forum Group Discussion Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Golongan I dan II	21 Juni 2021	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Oktavia
3	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang	26 November – 5 Desember 2018	Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Oktavia

Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

IKU 18 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan November 2021. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta diukur berdasarkan jumlah nilai dari 6 (enam) komponen. Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 85,19. Capaian yang diperoleh dari target 72,5 adalah 118%, berikut nilai hasil penilaian pengadaan barang/jasa Pangkalan PSDKP Jakarta:





No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta (10%)	10%
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)	13,35%
3	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)	10%
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)	31,84%
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)	5%
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Tw I s.d. Tw III Tahun 2021 (15%)	15%
		85,19%

Pada tahun 2020, IKU tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” telah berhasil dicapai dengan pemenuhan data dukung oleh pegawai yang berkompeten dalam bidang PBJ, sehingga lebih mudah dalam pemahaman terkait pemenuhan nilai LKE PBJ. Sesditjen PSKDP juga berperan dalam mengontrol proses pengelolaan BMN dengan melaksanakan rapat secara berkala dan memberikan pengingat di aplikasi grup *Whatsapp*.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” sebesar 17,5%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 8.160.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.160.000 (100%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis yang mendukung kompetensi pegawai dalam penyelesaian data dukung pengelolaan BMN. Berikut rekapitulasi sertifikat yang dimiliki

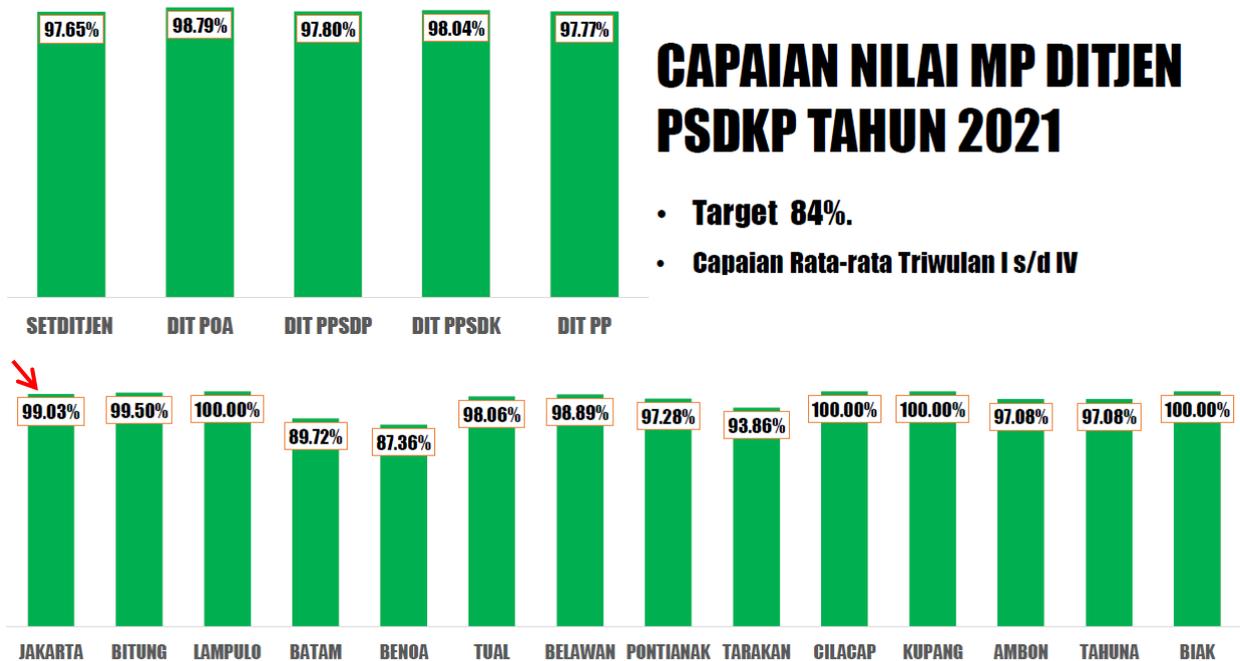


pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Jakarta :

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana	Nama Pegawai
1	Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	21 September 2018	PPM Manajemen	Aditya Jaka Sembada
2	Sertifikat tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa	21 September 2018	Deputi Bidan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Aditya Jaka Sembada

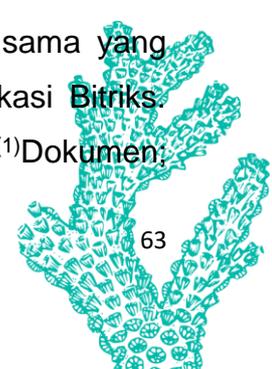
Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

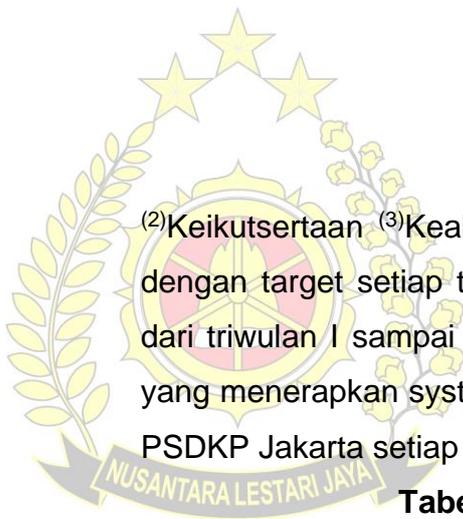
IKU 19 “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”



Gambar 5. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen;





⁽²⁾Keikutsertaan ⁽³⁾Keaktifan. Capaian rata-rata triwulan I s/d IV 2021 adalah 99,03% dengan target setiap triwulan adalah 84%. Nilai capaian didapatkan dari rata-rata nilai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Berikut tabel realisasi persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta setiap triwulan:

Tabel 38. Rekapitulasi Nilai MP Tahun 2020-2021

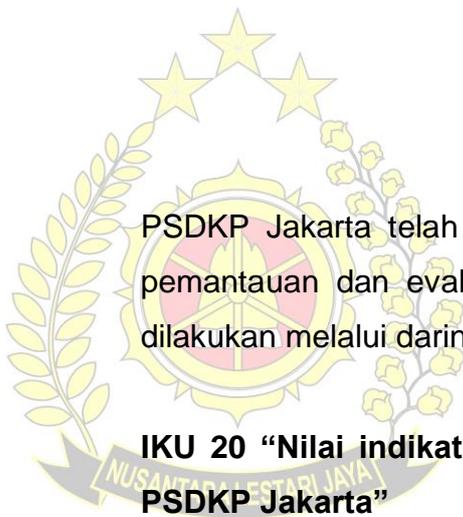
No.	Pengukuran	Nilai MP 2020 (%)	Nilai MP 2021 (%)
1	Triwulan I	100	96,11
2	Triwulan II	73,33	100
3	Triwulan III	80	100
4	Triwulan IV	93,33	100
Rata-rata		86,67	99,03

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 86,67% dengan capaian sebesar 106% sedangkan tahun ini mengalami peningkatan dengan nilai 99,03% dengan capaian 118%. Peningkatan terjadi dikarenakan nilai MP pada triwulan II tahun 2020 terdapat pegawai yang belum maksimal dalam keaktifan di aplikasi bitrix sehingga rata-rata di tahun 2020 lebih rendah dari tahun ini. Pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil meningkatkan nilai persentase sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari tahun sebelumnya dengan aktif mengupdate kegiatan di aplikasi bitrix minimal sebulan sekali.

Pada tahun 2024, target untuk persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta adalah 82. Di akhir periode renstra diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta masih tetap melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini. Pada renstra tahun 2021 target IKU ini adalah 82, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 99,03 maka nilai IKU ini sudah mencapai target yang telah ditentukan. Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah adanya koordinasi setiap subkoordinator untuk mengupdate kegiatan di bitrix setiap bulan.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" sebesar 18,2%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 13.300.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.225.000 (99,6%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan





PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

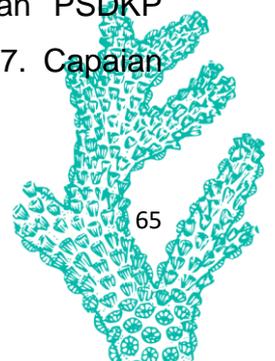
IKU 20 “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

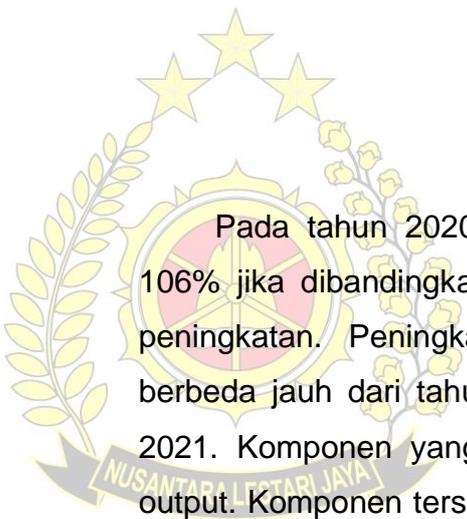
Capaian kinerja IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 13 (tiga belas) komponen capaian yaitu pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal IVI DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Penyerapan Anggaran, Pagu minus dan Dispensasi SPM. Rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran periode tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel x. Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2020-2021

No	Unsur	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Revisi dipa	5,00	5,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	3,33	4,55
3	Pagu Minus	5,00	5,00
4	Data Kontrak	15,00	8,30
5	Pengelolaan UP dan TUP	8,00	7,60
6	LPJ Bendahara	4,60	5,00
7	Dispensasi SPM	5,00	5,00
8	Penyerapan Anggaran	13,48	13,88
9	Penyelesaian Tagihan	12,00	10,00
10	Capaian Output	7,67	17,00
11	Retur SP2D	4,99	5,00
12	Renkas	0,00	0,00
13	Kesalahan SPM	4,50	4,75
Nilai Total		88,58	91,08
Konversi Bobot		95%	95%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		93,24	95,87

Pada tabel diatas, dapat diketahui realisasi nilai kinerja Pangkalan PSDKP merupakan hasil pembagian nilai total dengan konversi bobot yaitu 95,87. Capaian sampai dengan periode ini adalah 107% dengan target sebesar 89%.





Pada tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 93,24 dengan capaian sebesar 106% jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu 95,87 maka tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi dikarenakan terdapat komponen yang nilainya berbeda jauh dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi nilai total pada tahun 2021. Komponen yang nilainya tinggi pada tahun 2021 adalah komponen capaian output. Komponen tersebut rendah pada tahun 2020 dikarenakan penginputan capaian output pernah mengalami penolakan oleh KPPN dan pada tahun ini komponen tersebut telah meningkat dengan adanya petunjuk teknis pengisian capaian output pada pengisian aplikasi OMSPAN.

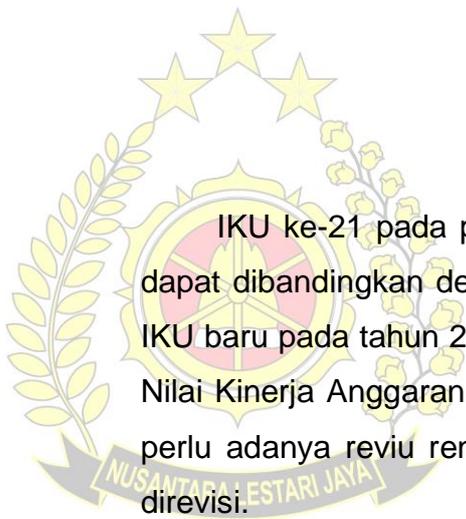
Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" sebesar 7,6%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1.189.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.185.000 (99,6%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya sosialisasi petunjuk teknis pengisian capaian output oleh DJPb (Direktorat Jenderal Pembendaharaan) yang dibagikan di aplikasi *twitter* pada tanggal 19 Maret 2021.

IKU 21 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)"

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2021 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86%. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2021 adalah 86,55% dengan capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai nilai target yang ditentukan. Keberhasilan pada iku ini tidak lepas dari peran aktif dari koordinator tingkat Seditjen yang secara berkala mengingatkan progress nilai kinerja anggaran di aplikasi grup *Whatsapp*.





IKU ke-21 pada periode tahun 2021 tidak dapat dilakukan pengukuran dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2020, karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2021. Sedangkan pada rencana strategis 2020-2024, target untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga perlu adanya revidi renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah direvisi.

Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)" sebesar 1,1%, nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efisien. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1.189.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.185.000 (99,6%). Dengan realisasi anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan tepat waktu dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 34.622.862.000 dan selama periode tahun 2021 telah mengalami 12 (Dua belas) kali revisi. Revisi anggaran dilakukan dikarenakan adanya perubahan pagu dan pergeseran pagu anggaran antar satker. Perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

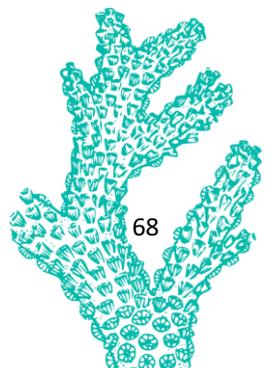
Tabel 39. Rincian Revisi Anggaran Periode Triwulan III Tahun 2021

REVISI	TANGGAL	NO SURAT	ANGGARAN	PERIHAL REVISI
1	08 Januari 2021	S-4/AG/AG.3/2021	Rp41.996.958.000	Perubahan rincian kegiatan
2	16 Februari 2021	S-88/AG/AG.3/2021	Rp41.984.958.000	Perubahan rincian kegiatan
3	17 April 2021	S-254/AG/AG.3/2021	Rp43.438.677.000	Perubahan pagu
4	10 Mei 2021	S-2055/WPB.12/2021	Rp43.438.677.000	Perubahan rincian kegiatan
5	02 Jun 2021	S-356/AG/AG.3/2021	Rp42.703.677.000	Perubahan pagu
6	09 Juli 2021	S-2626/WPB.12/2021	Rp42.703.677.000	Perubahan rincian kegiatan
7	22 Juli 2021	S-490/AG/AG.3/2021	Rp40.147.457.000	Perubahan pagu
8	13 Agustus 2021	S-649/AG/AG.3/2021	Rp34.128.912.000	Perubahan pagu
9	06 Oktober 2021	S-3956/WPB.12/2021	Rp34.128.912.000	Perubahan rincian kegiatan
10	26 Oktober 2021	S-802/AG/AG.3/2021	Rp34.622.862.000	Perubahan pagu
11	29 November 2021	S-5807/WPB.12/2021	Rp34.622.862.000	Perubahan rincian kegiatan
12	27 Desember 2021	S-7253/WPB.12/2021	Rp34.622.862.000	Perubahan rincian kegiatan

Realisasi Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 34.472.676.536 atau sebesar 99,57% dari alokasi anggaran sebesar Rp 34.622.862.000, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Tahun 2021

No	Kode Akun	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	15.405.669.000	15.296.023.390	99,28%
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	91.930.000	86.844.980	94,47%
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	449.126.000	446.617.887	99,44%
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.342.489.000	1.337.910.973	99,66%
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	17.333.648.000	17.306.279.306	99,84%
Total			34.622.862.000	34.472.676.536	99,57%





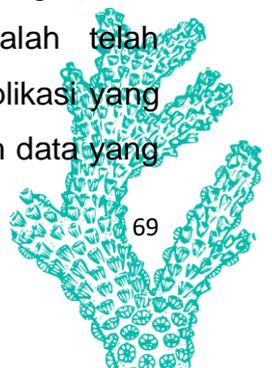
BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode tahun 2021 Pangkalan PSDKP menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun.

Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi semua capaian IKU sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan pada tahun 2021. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Desember tahun 2021 sebesar 109,98. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Keberhasilan dalam setiap IKU tidak lepas dari kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pemenuhan data dukung setiap triwulan. Berikut permasalahan dan kendala yang ada pada saat pemenuhan capaian IKU Pangkalan PSDKP Jakarta :

1. Pada pemenuhan capaian IKU 2, SUB IKU 4 yaitu terkait kegiatan pengawasan distribusi, salah satu pengukuran tercapainya IKU tersebut adalah telah terinputnya pelaku usaha yang diawasi pada aplikasi SIMWASKAN. Aplikasi yang digunakan sampai dengan tahun 2021 belum bisa menyesuaikan jumlah data yang





real dikarenakan format penginputan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengawas perikanan dalam pemenuhan data dukung.

2. Pada pemenuhan capaian IKU 2, SUB IKU 3 yaitu terkait kegiatan pengawasan budidaya. Terdapat SDM yang belum menguasai dan masih dalam tahap belajar dalam penginputan data pelaku usaha budidaya, sehingga masih banyak data yang ganda (*double data*) dan perlu adanya verifikasi data Kembali secara manual.
3. Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) sehingga perlu adanya reuiu Rencana Strategis 2020-2024.

4.2 Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam mengatasi kendala/permasalahan yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta adalah :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terhadap Aplikasi SIMWASKAN;
2. Sosialisasi penginputan kepada pengawas perikanan atau pegawai yang bertugas pada pengolahan data pengawasan budidaya;
3. Rapat reuiu renstra agar perlu dioptimalkan.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumono Darwinto**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sumono Darwinto

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antam Novambar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71
4.	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,41
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas F lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		13. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	90
		16. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)	1
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	84
		20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89
		21. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	21.512.585.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	195.330.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	602.500.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.931.684.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.754.859.000
	TOTAL	41.996.958.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta


Sumono Darwinto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MERDEKA TIMUR NO.16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumono Darwinto**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Antam Novambar

Jakarta, 28 April 2021
Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta


Sumono Darwinto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71
4.	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,41
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal Pengawas kelas VI (<i>Speedoat</i>) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		13. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	90
		16. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)	1
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	84
		20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89
		21. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	22.966.304.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	195.330.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	602.500.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.931.684.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.742.859.000
	TOTAL	43.438.677.000

Jakarta, 28 April 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta


Sumono Darwinto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MERDEKA TIMUR NO.16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumono Darwinto**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Jakarta, 20 Agustus 2021
Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sumono Darwinto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	71
4.	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	1,60
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,30
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase progres penyelesaian pembangunan Kapal Pengawas kelas VI (<i>Speedoat</i>) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	60,16
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80
		13. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	90
		16. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)	1
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	72,5
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	84
		20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89
		21. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	15.505.669.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	91.930.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	449.126.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.342.489.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.739.698.000
	TOTAL	34.128.912.000

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sumono Darwinto

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PANGKALAN PSDKP JAKARTA



Pangkalan PSDKP Jakarta telah berpartisipasi dalam perlombaan inovasi Ditjen PSDKP tahun 2021 untuk PSDKP Hebat pada tanggal 15-16 Desember 2021. Pangkalan PSDKP Jakarta telah mendapatkan juara ke-3 pada kategori SS "Sumbang Saran" dengan nilai 79,3 dan mendapat predikat penilaian Gold. Jumlah peserta untuk kategori ini sebanyak 9 orang. Perwakilan

peserta dari Pangkalan PSDKP Jakarta atas nama Muharamar Razak mendapatkan apresiasi berupa :

- 1) Plakat, piagam, dan pin;
- 2) Dipajang menjadi *icon group chat* seluruh Satker selama 7 hari;
- 3) Posting pada media sosial Ditjen. PSDKP;